

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografis

Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki luas sekitar 326,37 km² dan secara astronomis terletak di antara 07° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' s/d 112° 54' Bujur Timur.

Sebagian besar wilayah Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan air laut, kecuali di sebelah Selatan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan air laut.

Batas wilayah Kota Surabaya adalah sebelah Utara dan Timur dibatasi oleh Selat Madura, sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Sidoarjo dan sebelah Barat dibatasi oleh Kabupaten Gresik.

Populasi penduduk Kota Surabaya sampai dengan bulan Juni 2005 mencapai 2.701.312 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 1.358.610 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 1.342.702 jiwa, dengan tingkat kepadatan 8.277 jiwa / km².

Secara administrasi pemerintahan kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi Kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah Kecamatan yang ada di kota Surabaya sebanyak 31 Kecamatan dan jumlah Kelurahan sebanyak 163 Kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.363 RW (Rukun Warga) dan 8.909 RT (Rukun Tetangga).

Secara topografi Kota Surabaya merupakan dataran rendah yaitu 80,72 % (25.919,04 Ha) dengan ketinggian antara -0,5 – 5m SHVP atau 3 – 8 m LWS, sedang sisanya merupakan daerah perbukitan yang terletak di Wilayah Surabaya Barat (12,77%) dan Surabaya Selatan (6,52%). Adapun

kemiringan lereng tanah berkisar 0 - 2% daerah dataran rendah dan 2 - 15 % daerah perbukitan landai.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedang jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan).

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30° C dan minimum 25° C. (Stasiun Pengamat Perak 1/Tahun 2004).

2.2. Perekonomian Daerah

2.2.1. Kondisi Makro Ekonomi

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Berdasarkan data BPS Surabaya, perkembangan perekonomian kota Surabaya periode (2002-2004), menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup positif, masing-masing sebesar 3,80 persen (2002), 4,22 persen (2003) dan 5,45 persen (2004), sebagaimana tabel 2.1

Tabel 2.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2000 s/d 2004

| No. | Sektor | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Sektor Primer | -2,26 | -5,09 | -0,14 |
| | Pertanian | -2,24 | -5,23 | -0,21 |
| | Pertambangan dan Penggalian | -2,85 | 0,42 | 2,08 |
| 2 | Sektor Sekunder | 1,18 | 2,67 | 3,66 |
| | Indstr. Pengolahan | 0,53 | 1,77 | 2,51 |
| | Listrik, Gas, dan Air Bersih | 6,42 | 9,39 | 7,50 |
| | Konstruksi | 2,10 | 3,97 | 6,51 |
| 3 | Sektor Tersier | 6,11 | 5,55 | 6,90 |
| | Perdag. Hotel dan Restoran | 6,47 | 6,38 | 7,45 |
| | Pengangkutan dan Komunikasi | 7,46 | 5,98 | 6,20 |
| | Keu., Persewaan dan Jasa Persh. | 5,37 | 2,44 | 7,99 |
| | Jasa-Jasa | 2,03 | 2,99 | 3,04 |
| PDRB | | 3,81 | 4,23 | 5,45 |

Sumber : Bappeko Surabaya (2005), dalam Studi Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kota Surabaya, Tahun 2004

Secara umum peranan sektoral perekonomian kota Surabaya (2002-2004) rata-rata didominasi oleh sektor tersier (54,37 persen), kemudian diikuti oleh sektor sekunder (45,44 persen) dan terakhir sektor primer (0,19 persen). Besarnya peranan sektor tersier tersebut disumbang oleh (i) sektor perdagangan hotel restoran (34,76 persen), (ii) sektor angkutan dan komunikasi (8,98 persen), (iii) sektor perbankan dan lembaga keuangan (6,17 persen), dan (iv) sektor jasa-jasa (4,46 persen).

Disamping peranan masing-masing sektor usaha, pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga didukung oleh adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi selama tiga periode terakhir (2002-2004) terus mengalami penurunan, dengan tingkat inflasi masing-masing sebesar 9,30 persen (2002), 7,68 persen (2003) dan 6,96 persen (2004). Gambaran umum perkembangan tingkat inflasi di Kota Surabaya selama tiga periode terakhir dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2000 s/d 2004

| No. | Sektor | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Pertanian | 8.44 | 5.48 | 1.12 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 2.28 | 2.53 | 2.63 |
| 3 | Indstr. Pengolahan | 10.41 | 7.58 | 7.84 |
| 4 | Listrik, Gas, dan Air Bersih | 13.74 | 8.05 | 11.32 |
| 5 | Konstruksi | 7.75 | 7.15 | 5.92 |
| 6 | Perdag. Hotel dan Restoran | 9.59 | 9.84 | 5.85 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 5.30 | 4.39 | 6.79 |
| 8 | Keu., Persewaan dan Jasa Persh. | 9.13 | 3.71 | 8.46 |
| 9 | Jasa-Jasa | 8.73 | 5.35 | 7.27 |
| PDRB | | 9.30 | 7.68 | 6.96 |

Sumber : Bappeko Surabaya (2005), dalam Studi Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kota Surabaya, Tahun 2004

Adapun perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita yang pada hakekatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Secara lengkap gambaran tentang PDRB dan nilai PDRB perkapita di Kota Surabaya selama tiga periode terakhir (2002-2004) dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
PDRB dan Nilai PDRB Perkapita ADHB
Kota Surabaya Tahun 2002 – 2004

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|----------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2002 | 2003 | 2004 |
| 1 | PDRB (Rp. Juta) | 53.047.330 | 59.533.880 | 67.142.660 |
| 2 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | 2.647.283 | 2.660.381 | 2.681.092 |
| 3 | Nilai PDRB Per Kapita (Rp. Juta) | 20.04 | 22.38 | 25.04 |

Sumber : BPS Surabaya, 2004, diolah.

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari adanya perkembangan indikator perekonomian daerah (kota Surabaya) sebagaimana diuraikan diatas, adalah sebagai berikut :

- Perkembangan perekonomian nasional akan senantiasa mewarnai perkembangan ekonomi di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa perkotaan yang dahulu pernah dijadikan motor penggerak

pertumbuhan ekonomi nasional tampaknya tetap menjadi bahan pertimbangan untuk dapat memacu proses pemulihan perekonomian nasional. Dengan demikian, kedepan, wilayah perkotaan - termasuk salah satunya kota Surabaya - tampaknya akan tetap menjadi simpul pertumbuhan ekonomi yang cukup strategis dan diharapkan mampu memberikan *side effect* yang positif bagi perkembangan ekonomi daerah yang ada disekitarnya.

- Perkembangan sektor tersier di kota Surabaya dalam beberapa tahun terakhir tampaknya semakin cukup dominan apabila dibandingkan dengan dua sektor lainnya (primer dan sekunder), baik dilihat dari sisi peranan maupun pertumbuhannya, Dengan demikian, berbagai aktivitas yang ada dalam sektor tersier kedepan tampaknya akan memiliki *trend* yang cukup prospektif. Selain itu, adanya perkembangan kondisi perekonomian tersebut tentunya akan menimbulkan suatu tantangan untuk dapat memposisikan kota Surabaya sebagai kota yang benar-benar mampu memberikan suatu kondisi lingkungan yang tidak hanya kondusif namun juga kompetitif bagi perkembangan kota itu sendiri ketika harus dihadapkan pada perkembangan kota-kota lainnya, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.

2.2.2. Investasi

Pertumbuhan ekonomi selama tiga periode terakhir diyakini banyak ditopang oleh adanya peningkatan aliran investasi masuk ke Kota Surabaya. Investasi sendiri secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Lapda study penyusunan analisa ekonomi daerah, 2005).

Dalam hal perkembangan investasi, secara akumulatif sejak tahun 2002 hingga tahun 2004, angka persetujuan investasi baik PMA maupun PMDN yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya menunjukkan peningkatan sebesar 2,23 persen dan 32,55 persen untuk masing – masing jumlah proyek PMDN dan PMA, serta 3,70 persen dan 7,21 persen untuk masing – masing nilai investasi PMDN dan PMA. Secara lengkap perkembangan dari PMDN dan PMA tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Akumulasi Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Kota Surabaya
(Tahun 2002 –2004)

| Tahun | PMDN | | PMA | |
|-------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (Rp.Milyar) | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (US\$.Juta) |
| 2002 | 404 | 15.150 | 298 | 2.789 |
| 2003 | 408 | 15.506 | 352 | 2.968 |
| 2004 | 413 | 15.710 | 395 | 2.990 |

Sumber : BPKMD Prop Jawa Timur dan Dinas Perindag dan Penanaman Modal Kota Surabaya, 2005

Perkembangan investasi sebagaimana digambarkan diatas, setidaknya harus tetap menjadi perhatian bagi semua pihak, khususnya dalam upaya untuk senantiasa menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi yang dalam kaitan ini merupakan elemen yang cukup penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, adanya kelengkapan infrastruktur yang memadai, kesiapan SDM yang berkualitas, pemberian layanan perijinan yang prima serta jaminan stabilitas keamanan yang mantap serta peraturan – peraturan daerah berikut aturan pendukungnya termasuk dalam pengimplementasiannya, sudah tidak dapat ditawar – tawar lagi dalam mendorong pertumbuhan investasi di kota Surabaya.

2.2.3. Kondisi Keuangan Daerah

Di bidang keuangan daerah, pendapatan Daerah Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir, baik secara absolut maupun relatif cenderung

mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 764,48 milyar (2001) menjadi Rp. 1,36 triliun (2005), atau rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan sekitar 15,76%.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun selama 5 tahun terakhir peranannya masih pada posisi ke-2 setelah Dana Perimbangan namun memiliki perkembangan (*trend*) yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 27,21% (2001) menjadi 34,45% (2005), dan kenaikan tersebut lebih didorong oleh adanya kenaikan yang dialami oleh hampir seluruh sub-sub komponen yang ada dalam PAD, yaitu : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meskipun untuk sub komponen yang disebutkan terakhir memiliki peranan yang relatif kecil.

Untuk komponen Dana Perimbangan, peranannya selama 5 tahun terakhir dalam ikut membentuk total Pendapatan Daerah cenderung menunjukkan penurunan, yaitu dari 72,78% (2001) menjadi 62,48% (2005), dan penurunan tersebut lebih disebabkan oleh adanya penurunan peranan DAU (dari 43,35% pada tahun 2001 menjadi 26,41% pada tahun 2005) dan peranan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (dari 0,73% pada tahun 2001 menjadi 0,09% pada tahun 2005), sedangkan untuk peranan Dana Bagi Hasil Pajak dan peranan Dana Bagi Hasil dari Provinsi cenderung meningkat, yaitu masing-masing, dari 22,68% (2001) menjadi 23,50% (2005) dan dari 6,03% (2001) menjadi 12,48% (2005).

Selanjutnya untuk komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dalam hal ini dikelola melalui Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah, meskipun dalam 5 tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan peranan yang semakin meningkat (dari 0,01% pada tahun 2001 menjadi 3,06% pada tahun 2005), namun peranan tersebut masih relatif kecil dalam ikut menyumbang pembentukan total pendapatan daerah. Gambaran realisasi dan komposisi pendapatan

daerah selama tiga periode terakhir (2002-2004) dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Realisasi dan Komposisi Keuangan Daerah – Aspek Pendapatan

| KOMPONEN | REALISASI APBD ¹⁾ | | | | APBD SIH PAK ²⁾ |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1. Pendapatan Asli Daerah | 207,993.33 (27.21%) | 277,863.17 (30.19%) | 348,310.01 (30.26%) | 417,377.01 (31.37%) | 469,056.14 (34.45%) |
| 1.1. Pajak Daerah | 116,042.92 (15.18%) | 151,482.94 (16.46%) | 200,141.17 (17.39%) | 237,206.40 (17.83%) | 260,671.20 (19.15%) |
| 1.2. Retribusi Daerah | 76,056.67 (9.95%) | 96,580.00 (10.49%) | 115,900.03 (10.07%) | 135,137.94 (10.16%) | 146,492.02 (10.76%) |
| 1.3. Hasil Perusahaan Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6,022.09 (0.79%) | 11,392.40 (1.24%) | 12,619.24 (1.10%) | 14,253.96 (1.07%) | 33,081.26 (2.43%) |
| 1.4. Lain-2 Pendapatan Asli | 9,871.65 (1.29%) | 18,407.83 (2.00%) | 19,649.57 (1.71%) | 30,778.72 (2.31%) | 28,811.66 (2.12%) |
| 2. Dana Perimbangan | 556,406.31 (72.78%) | 642,327.64 (69.80%) | 765,175.29 (66.48%) | 877,432.59 (65.95%) | 850,676.40 (62.48%) |
| 2.1. Bagi Hasil Pajak | 173,357.27 (22.68%) | 201,665.65 (21.91%) | 280,933.04 (24.41%) | 350,413.85 (26.34%) | 320,000.00 (23.50%) |
| 2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak | 5,592.55 (0.73%) | 5,612.33 (0.61%) | 1,391.91 (0.12%) | 748.21 (0.06%) | 1,267.09 (0.09%) |
| 2.3. Dana Alokasi Umum | 331,374.60 (43.35%) | 334,343.35 (36.33%) | 331,570.00 (28.21%) | 342,168.00 (25.72%) | 359,520.00 (26.41%) |
| 2.4. Dana Alokasi Khusus | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) |
| 2.5. Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Propinsi | 46,081.89 (6.03%) | 100,706.31 (10.94%) | 151,280.35 (13.14%) | 184,102.53 (13.84%) | 169,889.31 (12.48%) |
| 3. Lain-2 Pendapatan yg Sah | 77.85 (0.01%) | 75.00 (0.01%) | 37,490.79 (3.26%) | 35,541.14 (2.67%) | 41,690.41 (3.06%) |
| 3.1. Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah | 77.85 (0.01%) | 75.00 (0.01%) | 37,490.79 (3.26%) | 35,541.14 (2.67%) | 41,690.41 (3.06%) |
| Pendapatan Daerah | 764,477.49 (100%) | 920,265.82 (100%) | 1,150,976.10 (100%) | 1,330,350.74 (100%) | 1,361,422.95 (100%) |

Sumber :

¹⁾ Dokumen Perhitungan APBD TA 2001 ; 2002 ; 2003 ; dan 2004

²⁾ Dokumen APBD TA 2005 (Setelah PAK)

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari perkembangan fenomena pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

- PAD, meskipun mengalami peningkatan peranan tidak begitu besar namun peningkatan peranan tersebut tampaknya memperlihatkan adanya suatu kecenderungan yang konsisten dari tahun ke tahun, dan ini tampaknya harus tetap dijaga untuk dapat lebih berperan dalam ikut menentukan besaran perolehan pendapatan daerah untuk masa-masa yang akan datang.
- Dana perimbangan, dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan peranan, dan penurunan tersebut lebih disebabkan oleh adanya penurunan peranan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi

Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam). Lebih jauh lagi, penurunan ini tampaknya tidak bisa dilepaskan dari fenomena yang saat ini tengah berkembang - dan sangat mungkin akan terus berlanjut untuk masa-masa yang akan datang - yaitu semakin terbatasnya keuangan negara yang didorong oleh semakin besarnya beban keuangan negara untuk melunasi hutang negara yang jatuh tempo dan pembiayaan berbagai subsidi dalam meringankan beban masyarakat, serta adanya tuntutan untuk lebih memelihara pelestarian lingkungan (konservasi SDA). Berpijak dari hal tersebut, kedepan komponen dana perimbangan akan sangat ditentukan oleh pos Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan dari Provinsi, dimana kedua komponen tersebut tidak akan bisa dilepaskan dari usaha keras yang harus dijalankan oleh pemerintah kota untuk dapat memperoleh dana *sharing* sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Untuk komponen pinjaman daerah, perhitungan dilakukan dengan metode kalkulasi *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang dilakukan secara regresif (ke belakang) dengan mengambil periode pengamatan antara tahun anggaran 2001 hingga tahun anggaran 2005 dapat diketahui bahwa kondisi kapasitas kemampuan keuangan daerah (APBD) dalam memenuhi kewajiban terhadap pinjaman yang dilakukan masih diatas batas yang dipersyaratkan ($\geq 2,5$) atau memiliki tingkat rata-rata sekitar 15,25. Namun demikian dengan adanya peluang tentang ketersediaan sumber dana pinjaman yang dapat dimanfaatkan sebagaimana yang telah digambarkan sebelumnya tentunya juga harus tetap menjadi bahan perhatian sebagaimana aspek legalitas, utamanya dalam hal ini, perhatian atas pengaruh yang akan ditimbulkan terhadap kemampuan keuangan daerah dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah pada periode-periode selanjutnya apabila sumber dana pinjaman yang ada tersebut benar-benar dimanfaatkan.

2.2.4. Kebijakan dan Capaian Indikator Program Pembangunan Ekonomi

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program dan capaian indikator sebagai berikut :

2.2.4.1. Program Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (UKM) dalam memasuki pasar global, sedangkan sasarannya adalah meningkatnya eksistensi Koperasi dan UKM serta penataan usaha informal Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program ini, telah ditetapkan beberapa indikator, yaitu :

- a. Jumlah UKM Mandiri sebanyak 250 dari jumlah UKM yang ada;
- b. Jumlah UKM Tangguh sebanyak 750 dari jumlah UKM yang ada;
- c. Jumlah Koperasi skor baik 355 unit
- d. Jumlah Pedagang Kaki Lima yang dibina meningkat.

Dilihat dari perkembangan yang terjadi selama tiga periode terakhir (2002-2004), maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program ini relatif cukup berhasil dimana hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Sampai dengan tahun 2004 jumlah UKM yang termasuk kategori mandiri telah mencapai 227 UKM atau meningkat 78,74 persen dibandingkan dengan tahun 2003 (127 UKM) dan 740,74 persen dibandingkan tahun 2002 (27 UKM);
- b. Untuk UKM yang termasuk dalam kategori tangguh, sampai dengan tahun 2004 telah terdata sejumlah 706 UKM atau meningkat 73,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya (406 UKM) dan 566,04 persen dibandingkan tahun 2002 (106 UKM);
- c. Dibidang perkoperasian sampai dengan tahun 2004 jumlah koperasi yang termasuk dalam klasifikasi skor baik telah mencapai 308 UKM atau meningkat 97,44 persen dibandingkan dengan

tahun 2003 (156 koperasi) dan 2.100 persen dibandingkan tahun 2002 (14 koperasi);

- d. Di sektor informal khususnya PKL, sampai dengan tahun 2004 jumlah PKL yang berhasil dibina bertambah 3.178 atau meningkat 28,66 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2.470 PKL) dan 47,68 persen dibandingkan tahun 2002 (2.152 PKL).

Untuk tahun 2005 target capaian kinerja untuk program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut : (i) jumlah UKM Mandiri bertambah sebanyak 100 UKM, (ii) jumlah UKM tangguh bertambah sebanyak 250 UKM, (iii) jumlah koperasi dengan skor baik bertambah sebanyak 142 koperasi dan (iv) jumlah PKL yang dibina .

Gambaran selengkapnya dari perkembangan capaian indikator kinerja program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan selama tiga periode terakhir (2002 – 2005) dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Kinerja
Program Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
(Tahun 2002 – 2005)

| Program | Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | Th. 2002 | Th. 2003 | Th. 2004 | Th. 2005 *) |
| Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan | 1. Jumlah UKM mandiri sebanyak 250 dari jumlah UKM yang ada | Jumlah UKM mandiri sebanyak 27 UKM | Jumlah UKM mandiri sebanyak 127 UKM | Jumlah UKM mandiri sebanyak 227 UKM | Jumlah UKM mandiri sebanyak 327 UKM |
| | 2. Jumlah UKM tangguh seba-nyak 750 dari jumlah UKM yang ada | Jumlah UKM tangguh sebanyak 106 UKM | Jumlah UKM tangguh sebanyak 406 UKM | Jumlah UKM tangguh sebanyak 706 UKM | Jumlah UKM tangguh sebanyak 956 UKM |
| | 3. Jumlah koperasi dengan skor baik sebanyak 355 dari jumlah koperasi yang ada | Jumlah Koperasi dengan skor baik adalah sebanyak 14 koperasi dari jumlah koperasi yang ada | Jumlah Koperasi dengan skor baik adalah sebanyak 156 koperasi dari jumlah koperasi yang ada | Penambahan jumlah Koperasi dengan skor baik sebanyak 308 koperasi | Penambahan jumlah Koperasi dengan skor baik sebanyak 450 koperasi |
| | 4. Jumlah Pedagang Kaki Lima yang dibina meningkat 15% | Jumlah PKL binaan adalah seba-nyak 2.152 PKL (jumlah PKL yang ada 15.603 PKL) | PKL yang dibina bertambah menjadi 2.470 PKL | PKL yang dibina bertambah menjadi 3.178 PKL | PKL yang dibina bertambah menjadi 3.298 PKL |

Sumber : Dokumen AKU APBD 2005

*) Target Capaian Kinerja

2.2.4.2 Program Peningkatan Penerimaan Daerah Dan Pelayanan Perizinan Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan investasi, sedangkan sasarannya adalah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan peningkatan pelayanan perijinan investasi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program ini, maka telah ditetapkan beberapa indikator, yaitu :

- a. Meningkatnya persentase pencapaian PAD \geq 36 persen pada tahun 2005 dari total penerimaan PAD tahun 2002
- b. Waktu proses penyelesaian perijinan investasi maksimal 10 hari.

Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program ini dapat dilihat dari capaian kinerja selama tiga periode terakhir (2002-2004) sebagai berikut :

- a. Capaian PAD pada tahun 2003 adalah sebesar Rp. 348,31 Miliar atau meningkat 25,35 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2002, sedangkan pada tahun 2004 capaian PAD adalah Rp. 365,71 Miliar atau meningkat 31,62 persen dibandingkan tahun 2002 (Rp. 277,86 Miliar).
- b. Waktu penyelesaian proses perijinan mengalami percepatan menjadi 7 hari.

Untuk tahun 2005 target capaian kinerja untuk program peningkatan penerimaan daerah dan pelayanan perizinan investasi adalah sebagai berikut : (i) Presentase pencapaian PAD pada tingkat capaian 10 persen dari target periode 2004, (ii) proses penyelesaian perijinan investasi selama 7 hari

Gambaran selengkapnya dari perkembangan capaian indikator kinerja program peningkatan penerimaan daerah dan pelayanan perijinan investasi selama tiga periode terakhir (2002 – 2005) dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Kinerja
Program Peningkatan Penerimaan Daerah Dan Pelayanan Perizinan Investasi
(Tahun 2002 - 2005)

| Program | Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| | | Th. 2002 | Th. 2003 | Th. 2004 | Th. 2005 ^{*)} |
| Peningkatan Penerimaan Daerah Dan Pelayanan Perizinan Investasi | 1. Meningkatkan prosentase pencapaian PAD \geq 36% pada tahun 2005 dari total penerimaan PAD pada tahun 2002 | Realisasi PAD tahun 2002, adalah sebesar Rp. 277,86 Milyar atau tercapai 113,11% dari target yang telah ditetapkan | Kumulatif persentase capaian PAD dari total penerimaan PAD tahun 2002, adalah sebesar 25,35% [(Rp. 348,31 Milyar : Rp 277,86 Milyar) x 100%] | Kumulatif persentase capaian PAD dari total penerimaan PAD tahun 2002, adalah sebesar 31,62% [(Rp. 365,71 Milyar : Rp 277,86 Milyar) x 100%] | Presentase pencapaian PAD pada tingkat capaian 10 persen dari target periode 2004 |
| | 2. Waktu proses perijinan investasi maksimal 10 hari | Waktu proses perijinan investasi dapat diselesaikan selama 10 hari | Waktu proses perijinan investasi dapat diselesaikan selama 10 hari | Peningkatan percepatan proses penyelesaian perizinan selama 7 hari | Percepatan proses penyelesaian perizinan selama 7 hari |

Sumber : Dokumen AKU APBD 2005

Keterangan ^{*)} : Target Capaian Kinerja

Relatif tingginya capaian kinerja dari pelaksanaan program - program ini tidak terlepas dari adanya konsistensi Pemerintah Kota didalam mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kedua program tersebut, seperti terlihat pada uraian berikut :

- a. Pada tahun 2003 alokasi anggaran untuk program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah sebesar Rp. 13.779.930.789,- atau meningkat 68.37 persen dibanding tahun 2002. Meski mengalami penurunan sebesar 39,29 persen (Rp. 8.366.399.494,-) di tahun 2004 namun secara keseluruhan hal tersebut tidak mempengaruhi capaian kinerja program.
- b. Untuk program peningkatan penerimaan daerah dan pelayanan perizinan investasi, pemerintah kota di tahun 2004 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 93.854.480.260,- atau mengalami peningkatan rata-rata diatas 1.000 persen apabila dibandingkan dengan dua periode sebelumnya (2002 – 2003).

Gambaran selengkapnya mengenai distribusi anggaran bagi program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan program peningkatan penerimaan daerah dan pelayanan perizinan investasi dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran
Program Peningkatan Penerimaan Daerah Dan Pelayanan Perizinan Investasi dan
Program Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
(Tahun 2002 – 2005)

| No | Program | Alokasi Anggaran | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2002 ¹⁾ (Rp.) | 2003 ¹⁾ (Rp.) | 2004 ¹⁾ (Rp.) | 2005 ²⁾ (Rp.) |
| 1. | Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan | 8.184.394.700 | 13.779.930.789 | 8.366.399.494 | 10.182.911.494 |
| 2. | Peningkatan Penerimaan Daerah Dan Pelayanan Perizinan Investasi | 6.390.580.000 | 6.392.261.675 | 93.854.480.260 | 84.665.105.628 |

Sumber : ¹⁾ Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, 2003, 2004, diolah

²⁾ Nota Keuangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2005, diolah

2.3. Sosial Budaya Daerah

Sebagai kota metropolitan, Surabaya secara fisik dan ekonomi memang telah berkembang secara luar biasa, tetapi yang menjadi masalah pertumbuhan kota yang ekspansif itu ternyata tidak diimbangi dengan tingkat perkembangan bidang sosial budaya yang memadai – seperti aspek kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan kesempatan kerja bagi penduduk yang bertambah cepat. Untuk menakar sejauh mana kemajuan program pembangunan bidang sosial-budaya di Kota Surabaya setidaknya harus berkaca pada dua hal. Pertama sejauhmana kota itu telah mampu menyediakan layanan fasilitas publik dan lapangan pekerjaan yang memadai bagi penduduknya, khususnya bagi penduduk miskin kota, Kedua sejauhmana kebijakan dan kemajuan sebuah kota dapat bersejajaran dengan kepentingan upaya mengembangkan kualitas pembangunan manusia. Sebuah kota yang tumbuh besar secara fisik dan

ekonomi, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

2.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Gambaran perkembangan kondisi sosial daerah merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat sejauhmana keberhasilan program pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia. Menurut *United Nations Development Program (UNDP)*, pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk. Dari definisi tersebut, ditegaskan bahwa fokus pembangunan yang sesungguhnya adalah penduduk atau manusia itu sendiri. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa konsep pembangunan manusia sebagai suatu upaya pembangunan kemampuan diri manusia yang mengandung empat unsur, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

Perkembangan IPM Kota Surabaya beserta komponen-komponennya, sebagaimana pada tabel 2.9. sebagai berikut :

Tabel 2.9.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya
(Tahun 2001 – 2004)

| IPM dan Komponen-komponennya | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Angka Melek Huruf | 94,6 | 96,24 | 97,11 | 96,81 |
| Rata-rata lama sekolah | 9,1 | 9,41 | 9,8 | 9,8 |
| Angka Harapan Hidup | 69,9 | 69,45 | 69,45 | 69,39 |
| Paritas Daya Beli | 1086,9 | 1141,1 | 1384,14 | 1946463 |
| IPM | 65,40 | 69,3 | 70,53 | 71,37 |

Sumber : BPS Kota Surabaya 2004, diolah

Angka melek huruf, didefinisikan sebagai proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya, terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih. Sedangkan Rata-rata lama sekolah, adalah rata-rata lama belajar yang telah ditempuh oleh penduduk 15 tahun keatas sepanjang hidupnya yang dimulai dari pendidikan dasar, dengan uraian sebagai berikut : Perkembangan AMH sampai dengan tahun 2002 mengalami kenaikan menjadi sebesar 96,24% dari 94,6% pada tahun 2001. Demikian juga halnya dengan RLS yang pada tahun 2002 mengalami kenaikan menjadi sebesar 9,4 tahun dari 9,1 tahun pada tahun 2001. Sedangkan pada tahun 2003, AMH kembali mengalami kenaikan menjadi 97,11% dan RLS juga meningkat menjadi 9,8 tahun.

Pembentukan dan/atau perkembangan indikator AMH dan RLS tersebut tentunya tidak terlepas dari perkembangan sejumlah indikator yang terangkum dalam bidang pendidikan, seperti : indikator akses pendidikan (Angka Partisipasi Murni/APM dan Angka Partisipasi Kasar/APK) dan indikator mutu pendidikan (Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Lulusan). Ini menunjukkan bahwa beberapa indikator akses pendidikan dan mutu pendidikan diyakini mampu memberikan pengaruh dan/atau kontribusi terhadap pencapaian indikator Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah.

Sampai dengan tahun 2004, capaian APM untuk tingkat pendidikan SD/MI adalah sebesar 89,94%, SLTP/MT's sebesar 74,26%, dan SMU/MA sebesar 77,75%. Demikian halnya dengan capaian APK untuk tingkat pendidikan SD/MI adalah sebesar 105,20%, SLTP/MT's sebesar 99,03%, dan SMU/MA sebesar 108,11%.

Untuk sejumlah indikator mutu menunjukkan, bahwa angka mengulang terbesar pada tahun 2004 terdapat pada tingkat SD/MI yaitu sebesar 1,13% dan terendah terdapat pada tingkat SMU/MA yaitu sebesar 0,45%, untuk SLTP/MTs sebesar 0,49 %. Selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat pendidikan

SMU/MA, yaitu 0,99% dan terendah terdapat pada tingkat SD/MI yaitu sebesar 0,09%, untuk SLTP/MTs sebesar 0,34%. Sedangkan untuk angka lulusan, pada tingkat SD/MI sebesar 99,06%, SLTP/MTs sebesar 99,79% dan 92,50% pada tingkat SMU/MA.

2.3.2. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)

Indeks Kemiskinan Manusia berbeda dengan IPM yang mengukur kemajuan dari suatu negara secara keseluruhan dalam mencapai pembangunan manusia, IKM menggambarkan sebaran dari suatu kemajuan dan mengukur ketertinggalan yang masih ada. IKM mengukur ketertinggalan atau deprivasi dalam dimensi yang sama dengan dimensi pembangunan manusia yang diukur dalam IPM. IKM difokuskan pada deprivasi dalam tiga dimensi, yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan peluang pada saat lahir untuk tidak bertahan hidup hingga usia 40 tahun; pengetahuan, yang diukur dengan angka buta huruf pada orang dewasa; dan ketersediaan sarana umum, yang diukur dengan prosentase penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap fasilitas kesehatan dan prosentase anak-anak dibawah usia lima tahun dengan berat badan kurang. (BPS dan UNDP, 2001 : 10)

Kondisi IKM penduduk Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.10.
Indeks Kemiskinan Manusia Kota Surabaya
(Tahun 2002 dan 2004)

| IKM dan Komponen - Komponennya | 2002 | 2004 * |
|--|-------------|---------------|
| Penduduk diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun (%) | 11,2 | 12,4 |
| Angka buta huruf dewasa (%) | 3,76 | 2,89 |
| Penduduk tanpa akses terhadap air bersih (%) | 2,88 | 4,91 |
| Penduduk tanpa akses sarana kesehatan (%) | 12,83 | 14,56 |
| Balita kurang gizi (%) | 18,69 | 14,09 |
| Nilai Komposit variabel ketertinggalan | 11,46 | 11,19 |
| Indeks Kemiskinan Manusia Kota Surabaya | 8,8 | 8,83 |

Sumber : Susenas, tahun 2004, diolah

*) dihitung berdasarkan data akhir tahun 2003

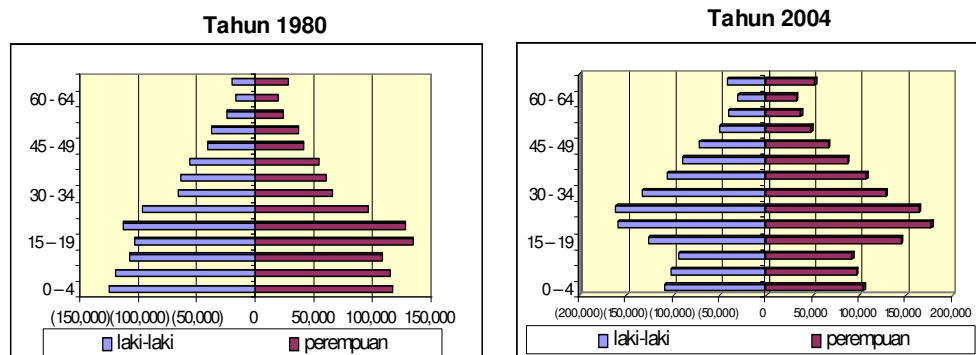
Dari hasil penghitungan tahun 2004, angka IKM Kota Surabaya diketahui mencapai angka 8,83. Kondisi IKM seperti ini secara relatif memang tergolong baik, terlebih diketahui bahwa di Propinsi Jawa Timur ada 26 kota dan kabupaten yang dilaporkan mengalami peningkatan angka IKM, yang berarti derajat kemiskinan masyarakat makin buruk. Dengan angka 8,83 berarti kondisi kemiskinan di Kota Surabaya sebetulnya tidak terlalu mencemaskan.

Namun demikian, bila dibandingkan tahun 2002, angka IKM Kota Surabaya tahun 2004 sedikit lebih buruk. Kalau melihat dari parameter yang dikaji, dapat dilihat bahwa faktor yang menyebabkan kondisi IKM Kota Surabaya sedikit memburuk adalah karena meningkatnya jumlah penduduk yang tanpa akses terhadap air bersih dan sarana kesehatan. Disamping itu indikator lain yang tampak sedikit memburuk adalah jumlah penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun.

2.3.3. Kependudukan

Dibanding tahun 1980, pada tahun 2004 struktur demografi Kota Surabaya mengalami perubahan seperti pada grafik 2.1. dibawah.

Grafik 2.1.
Perkembangan Penduduk Kota Surabaya
(Tahun 1980 dan 2004)



SUMBER : BPS KOTA SURABAYA, Tahun 2004, diolah

Dari sisi komposisi penduduk, dari grafik diatas menunjukkan bahwa tahun 1980 memberikan gambaran yang sangat berbeda dengan

komposisi penduduk tahun 2004. Tahun 1980 komposisi penduduk usia muda lebih besar dibanding tahun 2004.

Capaian program pembangunan di bidang kependudukan tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 ditunjukkan pada pencapaian sasaran terwujudnya tertib administrasi kependudukan, dengan indikator :

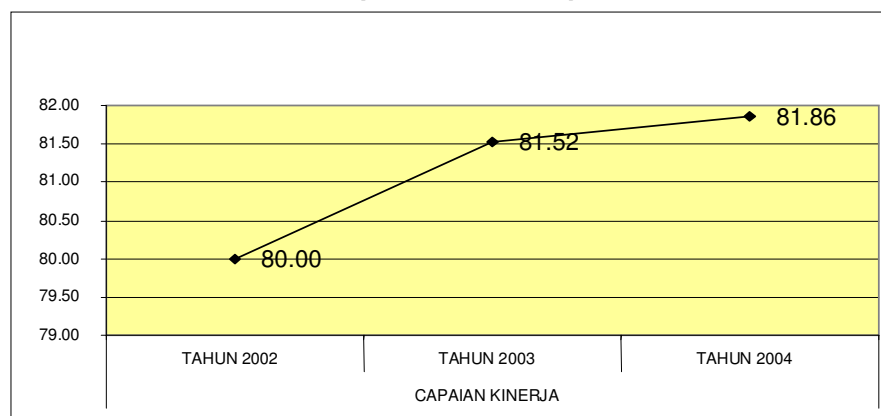
1. Penduduk ber-KTP

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dari seluruh wajib KTP yang ada.

Data perkembangan persentase penduduk ber-KTP di Kota Surabaya selama periode 2002 - 2004 relatif menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2002 jumlah penduduk yang ber-KTP mencapai 80% dari wajib KTP, tahun 2003 meningkat menjadi 81,52% dan tahun 2004 telah mencapai 81,86%.

Perkembangan penduduk ber-KTP dapat ditunjukkan pada grafik 2.2. berikut ini :

Grafik 2.2.
Persentase Penduduk ber-KTP Kota Surabaya
(Tahun 2002-2004)



Sumber data : Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, diolah

2. Penduduk ber-KK

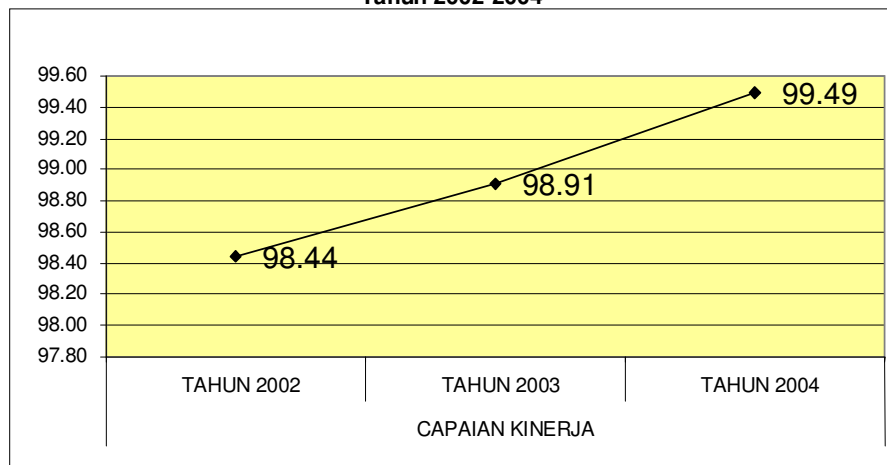
Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK), dimana pengukurannya didasarkan

pada jumlah penduduk yang telah memiliki KK dari seluruh wajib KK yang ada.

Perkembangan penduduk ber-KK di Kota Surabaya selama periode 2002 - 2004 relatif menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2002 jumlah penduduk yang telah memiliki KK mencapai 98,44% dari wajib KK, tahun 2003 meningkat menjadi 98,91% dan di tahun 2004 telah mencapai 99,49%.

Perkembangan penduduk yang memiliki KK dapat ditunjukkan pada grafik 2.3.berikut ini :

Grafik 2.3.
Persentase Penduduk ber-KK Kota Surabaya
Tahun 2002-2004



Sumber data : Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, diolah

3. Penduduk ber-Akte Kelahiran

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk baru lahir yang telah mengurus atau memiliki akte kelahiran, dimana pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk baru lahir yang telah mengurus atau memiliki akte kelahiran dari seluruh penduduk yang baru lahir.

Perkembangan penduduk baru lahir yang memiliki akte kelahiran di Kota Surabaya selama periode 2002- 2004 relatif menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2002 jumlah penduduk baru lahir yang telah memiliki akte kelahiran sebanyak 79,18%, tahun 2003 sebanyak 74,98% dan di tahun 2004 telah mencapai 67,31%.

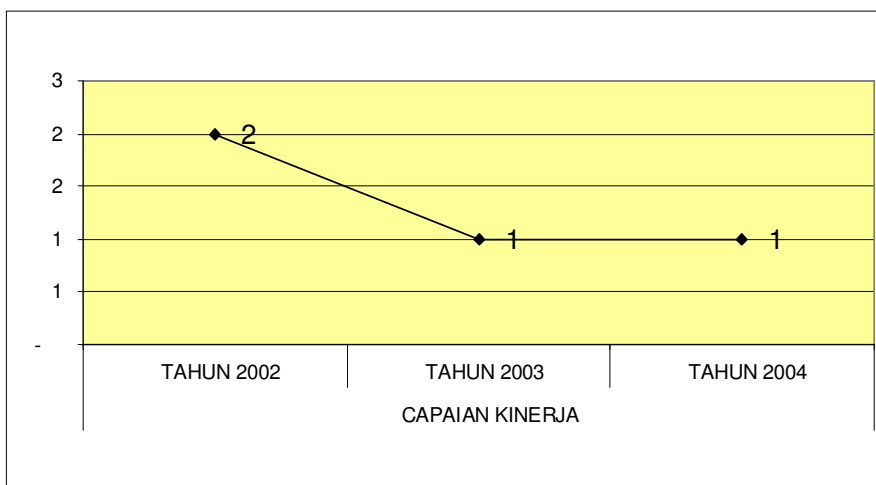
4. Lamanya Pengurusan KTP

Indikator ini menggambarkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus KTP, dimana pengukurannya didasarkan pada waktu pengurusan mulai dari memasukkan surat pengantar di Kecamatan hingga tercetaknya KTP.

Perkembangan lamanya pengurusan KTP di Kota Surabaya selama periode 2002 - 2004 relatif menunjukkan adanya penurunan (*semakin cepatnya waktu pengurusan*). Pada tahun 2002 rata-rata waktu pengurusan KTP menjadi 2 hari dibandingkan tahun 2001 yang masih 7 hari dan tahun 2003 telah menjadi 1 hari. Lamanya pengurusan KTP selama tahun 2003 ini masih tetap dipertahankan pada tahun 2004.

Perkembangan layanan penerbitan KTP dapat ditunjukkan pada grafik 2.4. berikut ini :

Grafik 2.4.
Lamanya Mengurus KTP di Kota Surabaya
(Tahun 2002-2004)



Sumber data : Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, diolah

2.3.4. Kebijakan dan Capaian Indikator Program Pembangunan Sosial Budaya Daerah

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program dan capaian indikator sebagai berikut :

2.3.4.1. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

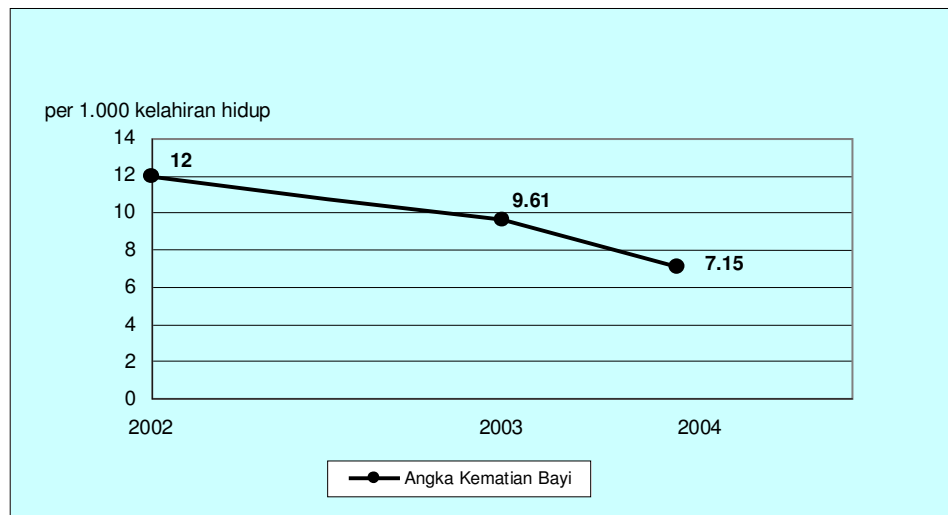
Program pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga kota, sedangkan sasarannya adalah meningkatnya pelayanan kesehatan dasar.

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian kinerja sasaran pembangunan di bidang kesehatan yaitu meningkatnya kondisi status kesehatan warga kota sesuai dengan indikator pembangunan kesehatan dengan indikator sebagai berikut :

a. Angka Kematian Bayi dibawah 10 per 1.000 Kelahiran Hidup

Indikator ini menggambarkan rata-rata jumlah kematian bayi pada setiap 1.000 kelahiran hidup. Perkembangan Angka Kematian Bayi selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dapat dilihat pada grafik 2.5. berikut ini :

Grafik 2.5.
Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Surabaya
(Tahun 2002 – 2004)



Sumber data : Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, diolah

Pada tahun 2002, Angka Kematian Bayi di Kota Surabaya mencapai sebesar 12 kematian per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2003 turun menjadi sebesar 9,61 kematian per 1.000 kelahiran hidup dan memasuki tahun 2004, Angka Kematian Bayi telah mencapai 7,15 kematian per 1.000 kelahiran hidup.

Perkembangan diatas menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi cenderung mengalami penurunan. Penurunan Angka Kematian Bayi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan terhadap bayi semakin meningkat.

b. Balita Dengan Status Gizi Buruk kurang dari 1%

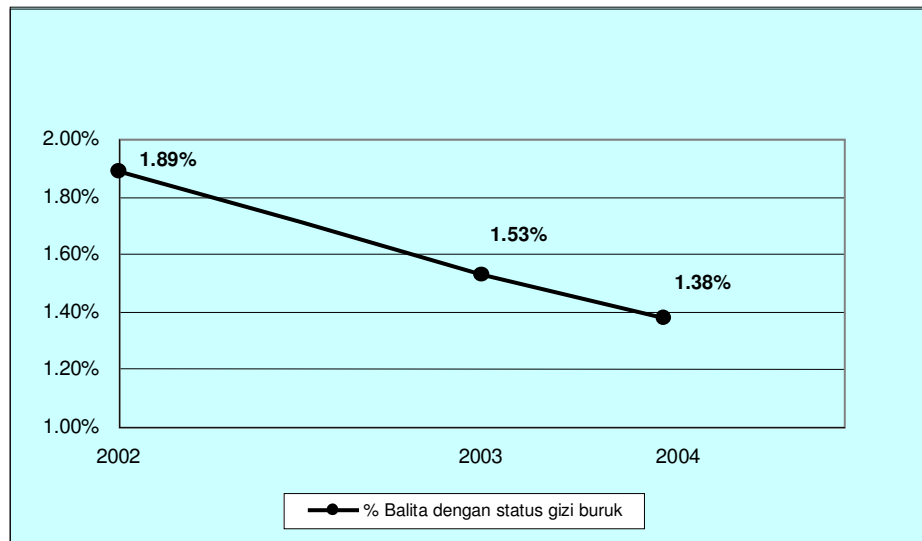
Indikator ini menggambarkan persentase jumlah balita yang memiliki status gizi buruk, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah balita dengan status gizi buruk dibagi dengan total jumlah balita yang ada.

Perkembangan balita dengan status gizi buruk selama tahun 2002 - 2004 menunjukkan kondisi sebagai berikut :

Pada tahun 2002 tercatat sebesar 1,89% balita yang berstatus gizi buruk, tahun 2003 turun menjadi 1,53% dan pada tahun 2004 telah mencapai 1,38%.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa persentase balita dengan status gizi buruk relatif mengalami penurunan.

Grafik 2.6.
Perkembangan Balita dengan Status Gizi Buruk di Kota Surabaya
(Tahun 2002 – 2004)

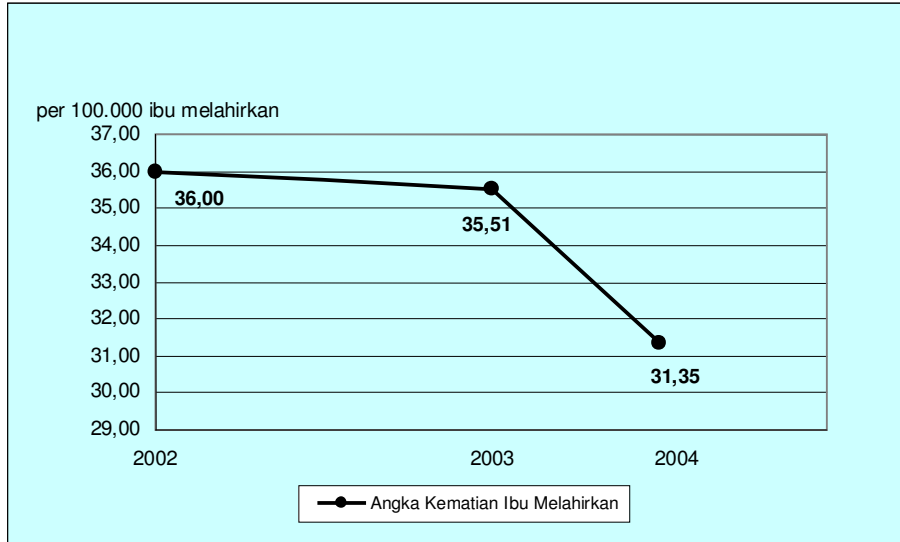


Sumber data : Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, diolah

c. Angka Kematian Ibu Melahirkan dibawah 125 per 100.000

Indikator ini menggambarkan rata-rata jumlah kematian ibu melahirkan setiap 100.000 kelahiran. Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan selama periode 2002-2004, dapat dilihat pada grafik 2.7. berikut ini :

Grafik 2.7.
Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Surabaya
(Tahun 2002 – 2004)



Sumber data : Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, diolah

Pada tahun 2002, Angka Kematian Ibu Melahirkan sebesar 36 kematian per 100.000 ibu melahirkan, tahun 2003 turun menjadi sebesar 35,51 per 100.000 ibu melahirkan. Pada tahun 2004, telah mencapai 31,35 per 100.000 ibu melahirkan. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Surabaya cenderung mengalami penurunan.

Capaian diatas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan ibu melahirkan relatif telah terlaksana dengan baik yang didorong oleh beberapa capaian indikator pelayanan yang ada dalam Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

1) Kunjungan Ibu Hamil

Persentase Jumlah kunjungan ibu hamil memperlihatkan angka kunjungan yang cukup menggembirakan. Hal ini menunjukkan

semakin tingginya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan ibu dan bayinya, sekaligus mengindikasikan semakin baiknya pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

2) Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan Yang Berkompeten

Persentase pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang berkompeten selama periode 2002 - 2004 rata-rata menunjukkan angka diatas 75% per tahun.

3) Ibu Hamil Risiko Tinggi Yang Dirujuk

Persentase jumlah ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk selama periode 2002-2004 mengalami penurunan. Penurunan ini menunjukkan semakin rendahnya jumlah ibu hamil yang berisiko tinggi.

2.3.4.2. Program Peningkatan Akses, Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

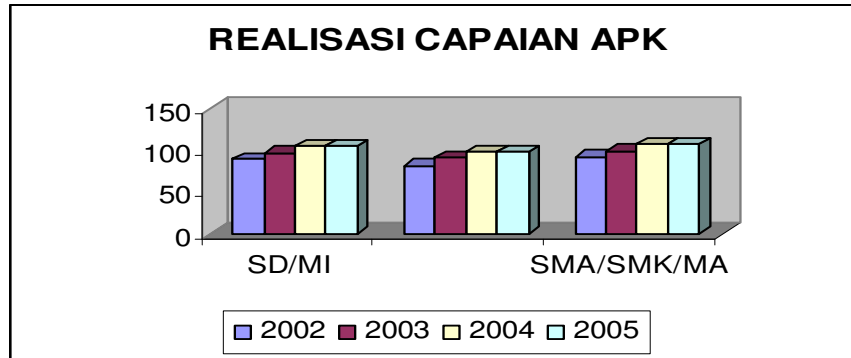
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan sasarannya adalah meningkatnya aksesibilitas pendidikan bagi warga kota dan meningkatnya mutu pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah, untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program ini, telah ditetapkan beberapa indikator, yaitu :

- a. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI sebesar 75 %, SMP/MTs sebesar 70 % dan SMA/SMK/MA sebesar 70 %.
- b. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/Mi sebesar 85 %, SMP/MTs sebesar 85 % dan SMA/SMK/MA sebesar 85 %.

Dilihat dari perkembangan selama periode terakhir (2002 – Juni 2005), dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program ini relative cukup berhasil dimana hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sampai dengan bulan Juni tahun 2005, di Kota Surabaya telah tercapai peningkatan yang dapat dilihat pada tabel diagram realisasi capaian Angka Patisipasi Kasar (APK) sebagai berikut :

Grafik 2.8.

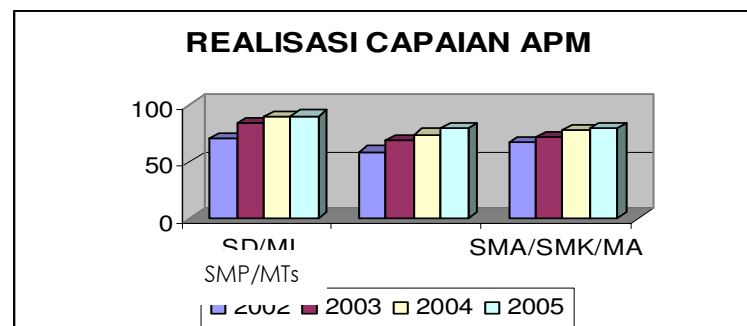


Sumber Data Realisasi Capaian LPJ Walikota .

Dari grafik tersebut terdapat peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2002 Angka partisipasi kasar (APK) untuk SD/MI sebesar 89,74 % sampai tahun 2005 meningkat menjadi 105,20 % ,untuk SMP /MTs pada tahun 2002 sebesar 81,84 % sampai tahun 2005 meningkat menjadi 99,03 % sedangkan untuk SMA/SMK/MA pada tahun 2002 sebesar 93,49 % sampai tahun 2005 meningkat menjadi 108,11 %.

2. Sampai dengan tahun 2005 di Kota Surabaya telah tercapai peningkatan yang dapat dilihat pada tabel diagram realisasi capaian Angka Patisipasi Murni (APM) sebagai berikut :

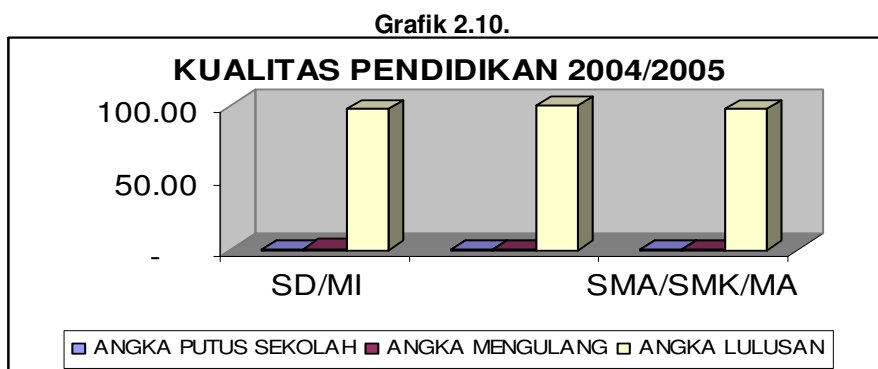
Grafik 2.9.



Sumber : Data Realisasi Capaian LPJ Walikota .

Dari grafik tersebut terdapat peningkatan dari tahun 2002 Angka partisipasi murni (APM) untuk SD/MI dari sebesar 70,71 % sampai dengan tahun 2005 meningkat menjadi 90,99 % , untuk SMP /MTs dari tahun 2002 sebesar 58,98 % sampai dengan tahun 2005 meningkat menjadi 79,18 % sedangkan untuk SMA/SMK/MA dari tahun 2002 sebesar 67,60 % sampai dengan tahun 2005 meningkat menjadi 79,79 % . Tantangan kedepan dirasa lebih berat guna meningkatkan target capaian khususnya pada anak – anak usia sekolah yang belum bersekolah dilihat dari permasalahan yang ada dimasyarakat serta menjawab target dari SPM pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 95 % kelompok usia 7 -12 tahun yang bersekolah di SD/MI, untuk kelompok usia 13 – 15 tahun yang bersekolah di SMP/ MTs , sedangkan pada kelompok usia 16 – 18 tahun yang bersekolah di SMA/SMK/MA target tersebut sudah tercapai hanya untuk mempertahankan target capaian tersebut yaitu target SPM Pendidikan adalah 60 % yang bersekolah sedangkan Kota Surabaya sekarang ini angka (APM) SMA/SMK/MA sudah mencapai 79,79 % .

3. Perbaikan kualitas pembangunan bidang pendidikan dirasa hampir tercapai namun ditingkat mikro ada banyak hal yang mesti dibenahi. Dari data statistik bidang pendidikan mungkin benar bahwa angka mengulang kelas dan kasus siswa putus sekolah tergolong kecil hal ini dapat dilihat pada grafik 2.10. sebagai berikut :

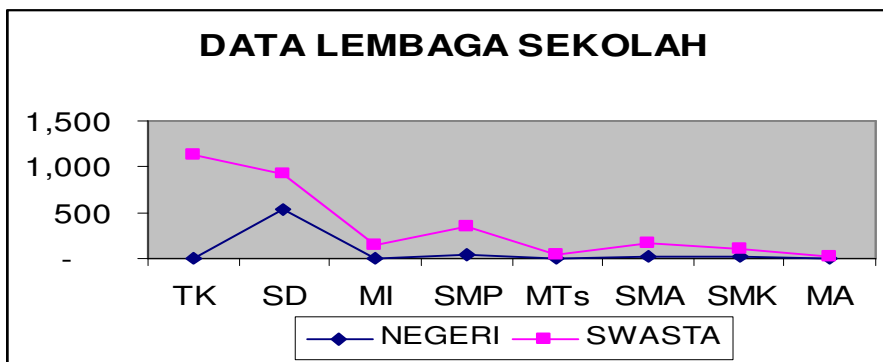


Sumber : Profil Pendidikan Kota Surabaya (Dinas Pendidikan)

Dari tabel diagram ini dapat dilihat data tahun 2003 / 2004 angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,11 %, SMP/MTs sebesar 0,39 % dan SMA/SMK/MA sebesar 0,62 sedangkan angka mengulang SD/MI sebesar 1,38 %, SMP/MTs sebesar 0,48 % dan SMA/SMK / MA sebesar 0,53 % , sampai tahun 2005 ada penurunan pada angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,10 %, SMP/MTs sebesar 0,38 % dan SMA/SMK/MA sebesar 0,56 sedangkan angka mengulang SD/MI sebesar 1,13 %, SMP/MTs sebesar 0,40 % dan SMA/SMK / MA sebesar 0,50 %.

4. Dalam rangka peningkatan akses, pemerataan dan kualitas pendidikan, beberapa kegiatan, antara lain: optimalisasi sarana prasarana melalui pengadaan laboratorium, pengadaan buku bahasa inggris, penambahan ruang kelas baru, revitalisasi gedung sekolah , pembinaan pendidikan dasar melalui pemberian bantuan dana operasional dan pemeliharaan, pembinaan pendayagunaan teknologi komunikasi untuk mendukung wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, penyusunan pedoman penerimaan siswa baru , pemberian subsidi biaya minimal pendidikan baik SD / MI, SMP / MTs serta pemberian pada AUS – KM untuk siswa SMA/SMK/MA . Pada tahun ajaran baru 2005 / 2006 Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dari adanya bantuan dana tersebut Pemerintah Kota Surabaya berusaha menambah bantuan tersebut berupa kegiatan bantuan biaya sekolah gratis SD / MI sebanyak 379 lembaga sekolah SD/MI. untuk SMP/MTs masih belum ditambahkan , sehingga masih banyak lembaga sekolah yang membutuhkan ,hal ini dapat dilihat dari tabel diagram jumlah lembaga sekolah yang ada di Kota Surabaya per jenjang pendidikan sebagai berikut :

Grafik 2.11.



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa masih banyaknya lembaga sekolah yang belum diberikan tambahan bantuan sekolah gratis baik untuk lembaga SD/MI maupun SMP/MTs . Pada unsur pemerataan untuk jenjang pendidikan sudah bisa dikatakan merata dari setiap jenjang, yaitu untuk Tingkat Pendidikan Dasar SD Negeri/Swasta sejumlah 921 lembaga, MI Negeri/Swasta 140 lembaga, SMP Negeri/Swasta sejumlah 341 lembaga MTs Negeri/swasta 31 lembaga, serta untuk tingkat Pendidikan Menengah yaitu SMA Negeri/Swasta sejumlah 158 lembaga, SMK Negeri/Swasta sejumlah 109 dan MA Negeri / Swasta sejumlah 11 lembaga dan untuk tingkat Pra Sekolah yaitu TK Negeri / Swasta sejumlah 1139 lembaga. Tetapi pada kecamatan – kecamatan tertentu di Kota Surabaya ada yang belum mempunyai SMA Negeri maupun SMK Negeri sehingga perlu adanya Usulan Sekolah Baru (USB) guna pencapaian akses untuk kesekolah agar lebih dekat serta tidak banyak mengeluarkan biaya untuk transportasi ke sekolah , tetapi hal itu juga harus melihat jumlah anak usia sekolah yang berada di kecamatan tersebut .

Peningkatan pada kualitas pendidikan ada beberapa hal yang harus kita cermati bersama sehingga kegiatan – kegiatan tersebut benar benar terarah dalam pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan . Guna mempertahankan apa yang telah kita raih yaitu telah tercapainya target renstra tahun 2002 – 2005 , namun demikian kita masih perlukan kiat – kiat khusus guna

mempertahankan tersebut. Adapun kegiatan dalam rangka menjawab permasalahan di bidang pendidikan antara lain adalah :

1. Pembinaan pendidikan menengah melalui penyelenggaraan manajemen sekolah, penyusunan pedoman sistem penerimaan siswa baru, penyusunan pedoman pendirian dan penutupan sekolah dan penunjang pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup, penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terdapat perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2002 untuk SD/MI sekitar 93,10 % sekolah sedangkan tahun 2004 telah mencapai 97,85 % sekolah, untuk SMP tahun 2002 sekitar 89,49 % sekolah pada tahun 2004 telah mencapai sekitar 97,07 % sekolah sedangkan untuk SMA/SMK/MA tahun 2002 sekitar 89,22 % sekolah pada tahun 2004 telah mencapai sekitar 97,11 % yang menerapkan MBS . Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sesuai dengan potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik serta kebutuhan masyarakat disekitar sekolah. Penerapan KBK di Kota Surabaya mulai berjalan tahun 2004 dengan beberapa lembaga sekolah yang masih mengikuti mengingat kebutuhan yang harus disediakan dengan persiapan sarana prasarana yang menunjang yaitu guru yang mempunyai kompetensi tertentu, media pembelajaran serta buku dll.

Pembinaan pendidikan luar sekolah melalui kelompok belajar Paket A setara SD, Paket B setara SLTP dan Paket C setara SMU Jurusan IPS, Kelompok Belajar Usaha.

Persebaran sekolah diberbagai kecamatan umumnya tidak merata dan tidak proporsional dengan proyeksi perkembangan jumlah penduduk usia sekolah, sehingga yang terjadi kemudian di satu sekolah yang lain justru mereka kekurangan siswa karena termasuk sekolah yang marginal alias tidak favorit, serta kondisi

gedung sekolah banyak yang mengalami kerusakan per jenjang pendidikan pada tahun 2005 dapat dilihat dari berbagai tingkat kerusakan pada tabel diagram sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Data Kondisi Ruang Kelas
(Tahun 2004 / 2005)

| LEMBAGA | BAIK | R.RINGAN | R.BERAT |
|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| SD | 4,307 | 1,192 | 508 |
| MI | 350 | 194 | 89 |
| SMP | 2,538 | 89 | 33 |
| MTs | 8 | - | 73 |
| SMA | 1,809 | 33 | 17 |
| SMK | 1,138 | 30 | 11 |
| MA | 33 | 3 | - |

Sumber data Profil Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2004/2005

Dari tabel 2.11. tersebut dapat dilihat bahwa kondisi ruang yang perlu direhabilitasi guna kelancaran proses belajar mengajar. Tingkat kerusakan tersebut sangat bervariasi untuk SD/MI antara kerusakan ringan dan kerusakan berat hampir 40 % dari kondisi yang baik, untuk SMP/MTs antara rusak ringan dan rusak berat tidak cukup banyak serta SMA/SMK/MA jumlah kerusakannya tidak cukup banyak.

2. Kondisi sarana pendidikan seperti laboratorium IPA, laboratorium bahasa inggris, perpustakaan, UKS, sarana olahraga, alat peraga mengajar, selain tidak tersebar merata, masih kurang memadai. Sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu proses belajar mengajar siswa dikelas. Di berbagai sekolah agama seperti MI., MTs dan MA kondisi sarana pendidikan yang tersedia umumnya lebih buruk dan kurang lengkap sehingga tidak memenuhi standart yang ada daripada disekolah negeri, sehingga wajar jika hal ini membutuhkan perhatian khusus.
3. Jumlah guru yang ada maupun tingkat kelayakan guru serta kompetensi sangat dibutuhkan dalam rangka menjawab guna

meningkatkan kualitas pendidikan disemua jejang hal ini dapat dilihat pada tabel 2.12. berikut ini :

Tabel 2.12.
Data Kelayakan Guru Mengajar
(Tahun 2004 / 2005)

| LEMBAGA | LAYAK | SEMI LAYAK | TIDAK LAYAK |
|----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| SD | 79.70 | 4.92 | 15.38 |
| MI | 67.22 | 14.78 | 18.00 |
| SMP | 85.53 | 7.14 | 7.33 |
| MTs | 93.13 | 3.31 | 3.56 |
| SMA | 77.77 | 18.12 | 4.11 |
| SMK | 69.73 | 20.12 | 10.15 |
| MA | 60.25 | 16.77 | 22.98 |

Sumber : data Profil Pendidikan Kota Surabaya tahun 2004/2005

Dari tabel 2.12. tersebut dapat dilihat bahwa kelayakan guru mengajar ditingkat jenjang pendidikan masih dirasa kurang kalau kita kaitkan dengan target yang ada di dalam SPM Pendidikan yaitu 90 % guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional, 90 % guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional, dan 90 % guru SMA/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional, serta 90 % guru SMK memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional. Kalau melihat seperti itu perlunya adanya kegiatan – kegiatan antara lain Penyetaraan Guru, Peningkatan Jenjang dari PGSD / D 3 / S1 dan S2 untuk guru SMA/ SMK / MA yang sesuai dengan kompetensi / Kualifikasi, atau diklat – diklat penjenjangan.

4. Pemberian bantuan kegiatan keolahragaan yang dilakukan sepanjang tahun 2002, antara lain pekan olahraga dan seni tingkat SD, Pekan Olah Raga Daerah Tingkat SMP/SMA/SMK yang meningkat sebesar 400 % dari tahun 2001. Peningkatan

bantuan yang telah diberikan, menghasilkan prestasi keolahragaan seperti: (1) juara umum Pekan Olahraga Daerah tingkat Propinsi Jawa Timur (2) Juara umum Pekan Olahraga dan Seni Sekolah dasar Tingkat Propinsi Jawa Timur.

5. Untuk pendukung kegiatan belajar dan meningkatkan minat baca masyarakat, maka ditahun 2002 di Kota Surabaya telah terjadi peningkatan kelengkapan sarana perpustakaan, khususnya pada (1) perpustakaan umum kota surabaya berupa koleksi buku pada tahun 2002 - 2005 sampai bulan Agustus dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.13.
Data Koleksi Buku
(Tahun 2002 – 2005)

| TAHUN | JUMLAH | KETERANGAN |
|-------|------------|-------------------------|
| 2002 | 11,548 Eks | Sampai bln Agustus 2005 |
| 2003 | 33,754 Eks | |
| 2004 | 24,121 Eks | |
| 2005 | 16,996 Eks | |

Sumber Kantor Perpustakaan Kota Surabaya

Dari tabel 2.13. tersebut apabila koleksi buku yang dipunyai oleh perpustakaan minim dari segi jumlah maka sangat berpengaruh pada kebutuhan beberapa pihak yang sangat memerlukan yaitu sebanyak 35 LSM/Organisasi Sosial, Pelayanan satu mobil keliling yang baru bisa melayani sebanyak 70 kali dalam satu tahun, perpustakaan kelurahan sekitar 139 kelurahan dari 163 kelurahan yang ada , perpustakaan sekolah yang masih minim jumlahnya ,untuk SD/MI sejumlah 499 lembaga , tingkat SMP/MTs 280 lembaga dan tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 212 lembaga ,guna menambah wawasan serta ilmu pengetahuan ,serta kita juga bisa melihat dari animo masyarakat untuk menggunakan perpustakaan sebagai penyedia informasi,

sebagai media pembelajaran dan sumber pengetahuan dalam upaya mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.14.
Data Jumlah Pengunjung
(Tahun 2002 – 2005)

| TAHUN | JUMLAH | KETERANGAN |
|-------|--------------|-------------------------|
| 2002 | 31,762 Orang | Sampai bln Agustus 2005 |
| 2003 | 35,945 Orang | |
| 2004 | 57,248 Orang | |
| 2005 | 71,062 Orang | |

Sumber : Data Kantor Perpustakaan Kota Surabaya, tahun 2005, diolah

Dari tabel tersebut, dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung yang semakin banyak, maka masih diperlukan penambahan kelengkapan sarana maupun prasarana perpustakaan tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Kota Surabaya melalui minat baca masyarakat, guna meningkatkan kualitas pendidikan.

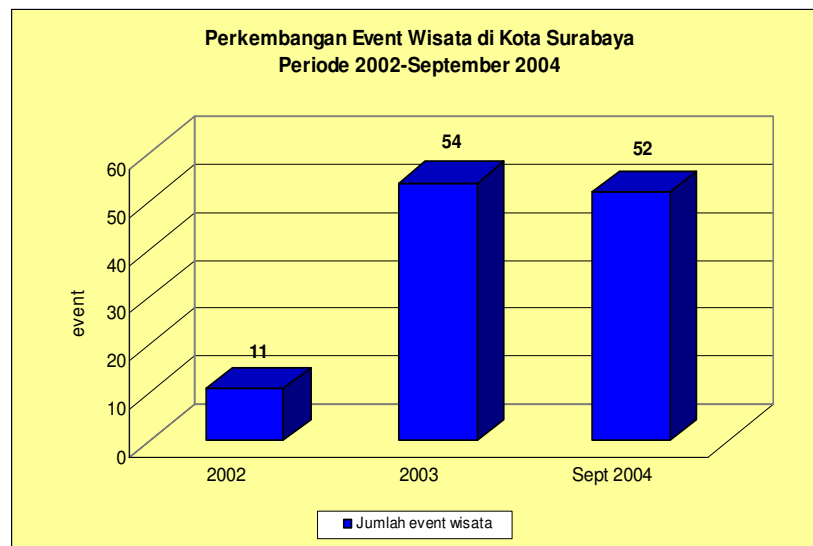
Sementara itu, untuk pengembangan aktualisasi budaya lokal, hasil yang dicapai di tahun 2002 antara lain adalah :

1. Terlaksananya peningkatan pelestarian warisan budaya melalui
 - (1) Fasilitasi kepada kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 42 kelompok, dalam rangka peningkatan wawasan para penghayat sehingga mereka mampu melestarikan ajaran yang tidak menyimpang dengan norma agama
 - (2) Fasilitasi bantuan dana pengembangan kesenian kepada 8 group kesenian, diharapkan mampu meningkatkan aktivitas seni guna mengembangkan profesionalitas dibidang kesenian dalam rangka peningkatan pelestarian budaya lokal
 - (3) Fasilitasi kesenian tari daerah dan seni vokal kepada 31 sekola

dan 31 sanggar dalam rangka peningkatan kualitas seni siswa dan sanggar.

2. Terlaksananya pengembangan kesenian melalui pementasan seni sebanyak 11 even antara lain : (1) festival reog ponorogo (2) pengiriman group reog ke jakarta (3) mengikuti paket budaya di TMII Jakarta (4) Paket Budaya di Malang (5) paket budaya di Pandaan (6) Gelar kesenian tardisional di Taman Hiburan Rakyat (THR) Surabaya (7) Gelar Seni di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Surabaya dan (8) Pentas Seni siswa sekolah dasar di THR sebanyak 4 even. Pelaksanaan pentas seni tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas kesenian dalam rangka pengembangan apresiasi seni demi pelestarian seni budaya lokal.

Grafik 2.12.



Sumber : Nota Perhitungan

2.3.4.3. Program Perbaikan Kesejahteraan Keluarga Miskin Kota

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, sedangkan sasarannya adalah meningkatkan keberdayaan keluarga miskin.

Hasil pencapaian sasaran pembangunan dibidang sosial tercermin pada beberapa indikator berikut ini :

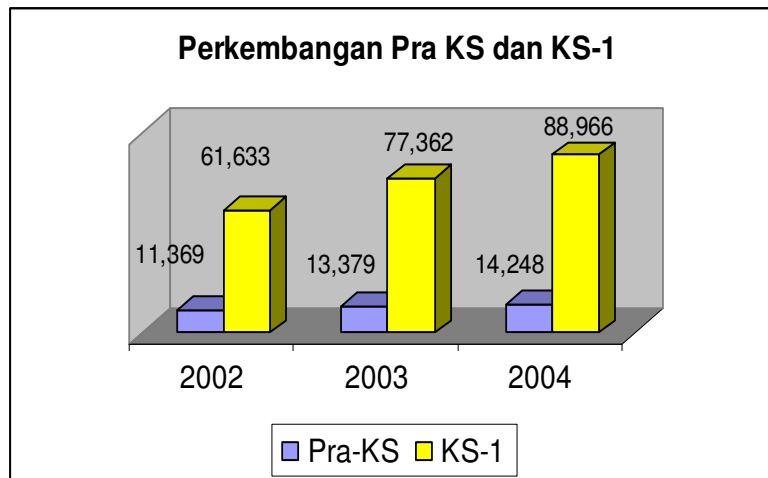
- a. Jumlah Pra Keluarga Sejahtera (Pra – KS) yang menjadi Keluarga Sejahtera 1 (Pra KS-1).

Jumlah Pra Keluarga Sejahtera (Pra-KS) yang menjadi Keluarga Sejahtera 1 (Pra KS-1)di Kota Surabaya selama tahun 2002 sampai dengan 2004 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini akan berimplikasi pada bertambahnya jumlah keluarga Sejahtera 1 (KS-1) di kota Surabaya.

Adapun perkembangan jumlah Pra Keluarga Sejahtera dan keluarga sejahtera selama periode 2002 – 2004 adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2002 jumlah Pra- KS sebanyak 11.369 keluarga dan KS-1 sebanyak 61.633 keluarga. Tahun 2003, jumlah Pra KS mencapai 13.379 keluarga dan KS-1 mencapai 77.362 keluarga. Sedangkan di tahun 2004 sampai 2004 jumlah Pra KS adalah 14.248 keluarga dan KS-1 sebanyak 88.966 keluarga.

Grafik 2.13.

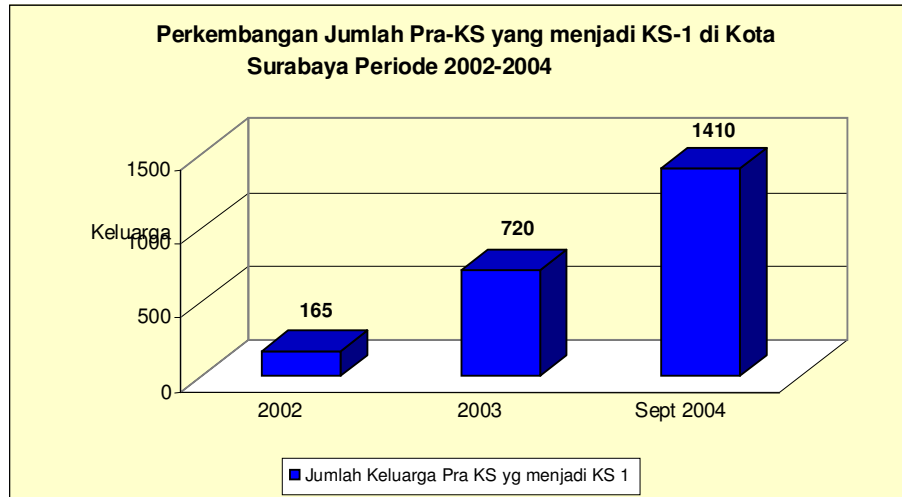


Sementara perkembangan jumlah pra Keluarga Sejahtera 1 (KS-1) yang berubah menjadi KS-1 dan keluarga sejahtera selama periode 2002 – september 2004 adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2002, jumlah Pra-KS yang berubah menjadi KS-1 sebanyak 165 keluarga, tahun 2003 bertambah sebanyak 720 keluarga dan di tahun 2004, sampai September 2004 sebanyak 1.410 keluarga. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa

jumlah Pra Keluarga Sejahtera yang berubah status menjadi keluarga sejahtera cenderung mengalami peningkatan.

Grafik 2.14.



Perkembangan tersebut didukung oleh strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan keberdayaan keluarga miskin seperti pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh. Kegiatan ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin kota melalui Tri Daya, Yaitu Manusia, Usaha dan lingkungan melalui pelatihan ketrampilan, kelembagaan, industri kecil, bantuan kredit dan peningkatan kualitas rumah tinggal yaitu dapur, kamar mandi atau komponen rumah lainnya serta perbaikan jalan dan lingkungan.

Mengingat jumlah Pra KS yang mendapat pembinaan masih tidak sebanding dengan peningkatan jumlah keluarga miskin, maka jangkauan pelayanan yang diberikan pada keluarga miskin dari tahun ke tahun harus lebih banyak dan berkualitas serta dukungan dana yang memadai.

Sementara Berdasarkan data BPS Propinsi Jawa Timur (2002), jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya tercatat sebanyak 296.498 jiwa atau sekitar 11,4 % dari total jumlah penduduk (2.599.796 jiwa). Kalau dilihat menurut jumlah KK-nya, di Surabaya tercatat KK miskin sebanyak 80.109 KK atau 11, 28 % dari total jumlah rumah tangga di Kota Surabaya (709.991 KK).

Tabel 2.15.
Keluarga Miskin di Kota Surabaya
(Tahun 2001, 2003, dan 2005)

| Tahun | KK | Jiwa |
|--------------|-----------|-------------|
| 2001 | 80.199 | 296.498 |
| 2003 | 90.084 | 323.048 |
| 2005 | 103.462 | 367.849 |

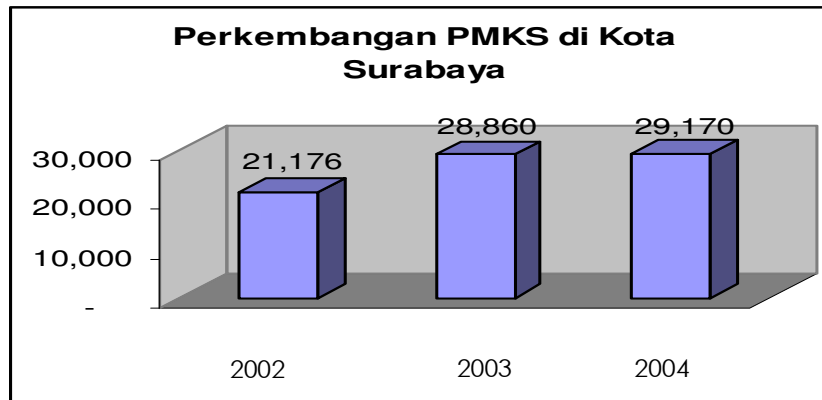
Sumber : BPS dan BKKK Kota Surabaya (diolah)

- b. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dibina.

Perkembangan jumlah PMKS tahun 2002 – 2004 sebagai berikut :

Tahun 2002, jumlah PMKS mencapai 27.176 orang, sementara tahun 2003 bertambah menjadi 28.860 orang dan tahun 2004 sampai dengan 2004 mencapai 29.170 orang.

Grafik 2.15.



Meskipun jumlah PMKS cenderung meningkat, akan tetapi peningkatan tersebut diikuti dengan meningkatnya pembinaan terhadap PMKS.

2.3.4.4. Program Pembangunan Ketenagakerjaan

Program pembangunan di bidang ketenagakerjaan bertujuan mengurangi pengangguran, sedangkan sasarannya adalah terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga

kerja. Pencapaian kinerja sasaran pembangunan di bidang ketenagakerjaan dengan indikator sebagai berikut :

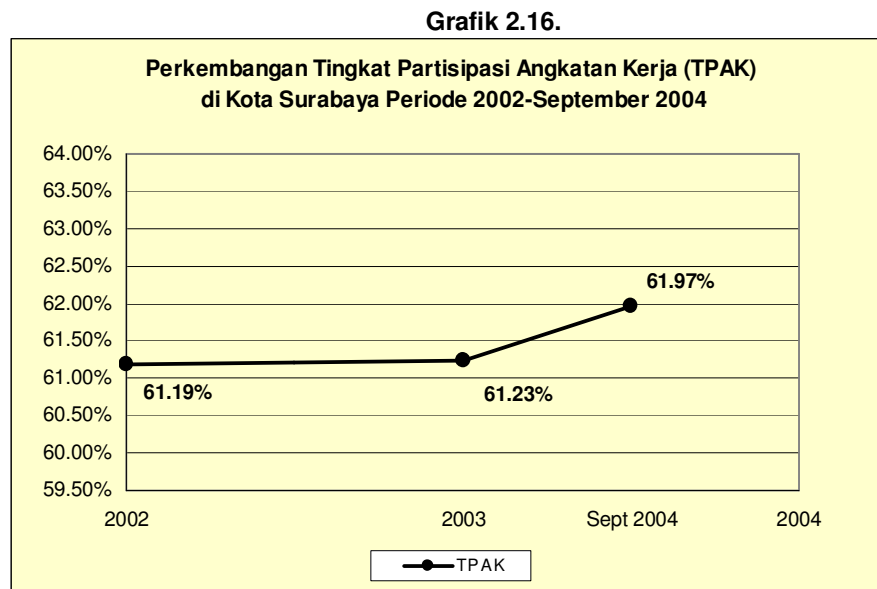
1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator ini menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja pada periode tertentu, dimana pengukurannya didasarkan pada perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja sebagaimana dimaksud adalah penduduk dengan usia lebih dari 15 tahun, sedangkan yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan.

TPAK di Kota Surabaya selama tahun 2002 sampai dengan September 2004 menunjukkan perkembangan sebagai berikut :

Pada tahun 2002 TPAK mencapai 61,19%, tahun 2003 naik menjadi 61,23% dan di tahun 2004 sampai dengan bulan September, TPAK di Kota Surabaya telah mencapai angka 61,97%. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa TPAK di Kota Surabaya cenderung menunjukkan adanya peningkatan.

Berikut ini adalah grafik perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Surabaya selama periode 2002-September 2004 :



Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya (Diolah)

Perkembangan TPAK sebagaimana terlihat di atas, pada dasarnya menunjukkan bahwa pertumbuhan alami dari jumlah penduduk usia kerja juga diikuti dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja baik yang telah memasuki dunia kerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa salah satu komponen dari angkatan kerja adalah penduduk yang sedang bekerja atau tenaga kerja yang sudah terserap. Berikut ini adalah perkembangan penyerapan/penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja/Proyek APBN/Swasta dan sektor informal selama tahun 2002 sampai dengan September 2004 :

Tabel 2.16.
Perkembangan Penyerapan / Penempatan Tenaga Kerja
(Tahun 2002 – 2003)

| URAIAN | 2002 | 2003 | 2004 (s/d Sept) | TOTAL | SUMBER |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|------------------------|
| MEKANISME ANTAR KERJA | 1.205 | 4.263 | 4.239 | 9.707 | Data Disnaker |
| PROYEK APBN/APBD DAN SWASTA | 54.858 | 53.753 | 40.204 | 148.815 | Data Jamsostek |
| SEKTOR INFORMAL | 5.881 | 13.021 | 37.514 | 56.416 | Data USK dan PD. Pasar |
| TOTAL | 61.944 | 71.037 | 81.957 | 214.938 | |

Sumber data : Disnaker Kota Surabaya (Diolah)

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa penempatan kerja melalui mekanisme antar kerja yaitu penempatan kerja terdaftar pada Disnaker yang ditempatkan pada perusahaan perusahaan swasta dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 253,78% sedangkan tahun 2003 sampai dengan September 2004 mengalami penurunan sebesar 0,7%. Berdasarkan sumber dari jamsostek bahwa penempatan tenaga kerja dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 2,01% dan tahun 2003 sampai dengan september 2004 mengalami penurunan sebesar 25,21%, namun dari sektor informal penempatan tenaga kerja tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 121,41% dan

tahun 2003 sampai dengan September 2004 mengalami peningkatan sebesar 180,10%

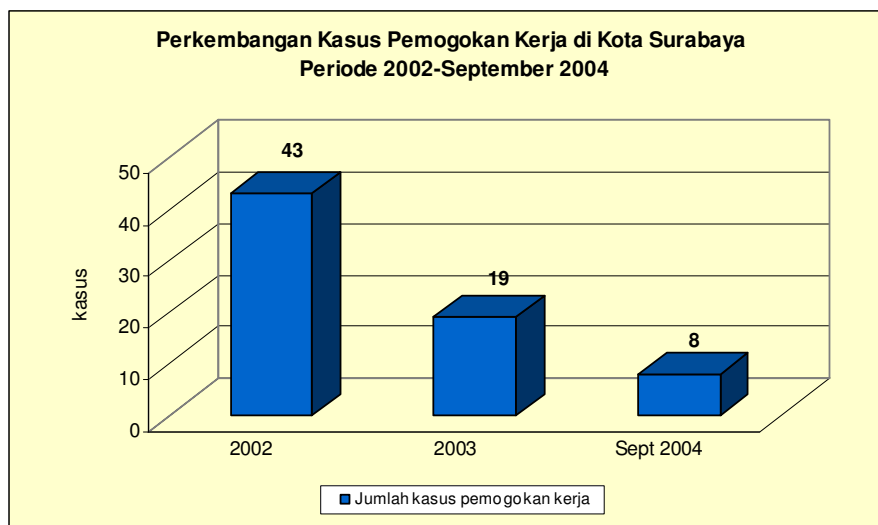
2) Jumlah pemogokan kerja

Indikator ini menggambarkan banyaknya kasus pemogokan kerja selama periode tertentu, dimana pengukurannya didasarkan pada jumlah kasus pemogokan karyawan pada beberapa perusahaan yang terjadi setiap tahun.

Perkembangan jumlah kasus pemogokan di Kota Surabaya selama tahun 2002 sampai dengan September 2004 cenderung menunjukkan adanya penurunan yang cukup berarti. Pada tahun 2002, jumlah kasus pemogokan sebanyak 43 kasus atau turun sekitar 18,87% dari 53 kasus di tahun 2001, tahun 2003 menjadi 19 kasus atau turun sekitar 64,15%. Sementara itu pada tahun 2004 sampai dengan bulan September, jumlah kasus pemogokan hanya sebanyak 8 kasus. Bila kondisi ini dapat bertahan sampai dengan akhir tahun 2004, maka dibandingkan dengan tahun 2003, mengalami penurunan sekitar 57,89%.

Berikut ini adalah grafik perkembangan kasus pemogokan kerja di Kota Surabaya periode 2002-September 2004 :

Grafik 2.17.



Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya (Diolah)

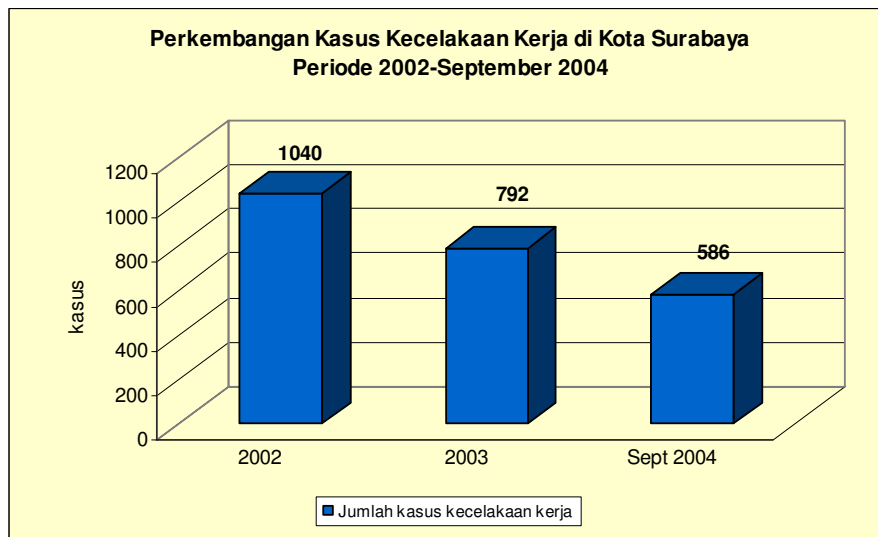
3) Jumlah Kecelakaan Kerja

Indikator ini menggambarkan banyaknya kasus kecelakaan kerja selama periode tertentu, dimana pengukurannya didasarkan pada jumlah kasus kecelakaan kerja karyawan pada beberapa perusahaan yang terjadi setiap tahun.

Pada tahun 2002, jumlah kasus kecelakaan kerja sebanyak 1040 kasus atau turun sekitar 16,67% dari 1.248 kasus di tahun 2001. Kemudian di tahun 2003 menjadi 792 kasus atau turun sekitar 36,53%. Sementara itu di tahun 2004 sampai dengan bulan September, jumlah kasus kecelakaan kerja sebanyak 586 kasus. Bila sampai dengan akhir tahun 2004, tidak ada lagi penambahan kasus kecelakaan kerja, maka terjadi penurunan sekitar 26,01% dibandingkan jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2003. Perkembangan ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap tenaga kerja relatif cukup berhasil.

Perkembangan jumlah kasus kecelakaan kerja dapat ditunjukkan pada grafik berikut ini :

Grafik 2.18.



Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya (Diolah)

2.4. Kebijakan dan Capaian Indikator Program Pembangunan Prasarana dan Sarana

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program dan capaian indikator sebagai berikut :

2.4.1. Program Penataan Ruang

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang

Luas wilayah Kota Surabaya berkisar 55,26 Km² yang meliputi wilayah darat dan laut, wilayah darat seluas 33,6 Km² sedangkan wilayah laut sekitar 22,56 Km². Pada tahun 2002, luas wilayah yang telah memiliki Rencana Tata Ruang Kota adalah 21.469,10 ha atau sebesar 65 % dari luas wilayah Surabaya, tahun 2003 seluas 23.314,41 ha atau sebesar 71 % dari luas wilayah Surabaya, dan pada tahun 2004, sampai dengan bulan September telah mencapai seluas 24.814,41 ha atau 74,50 % dari luas wilayah Surabaya. Dari RTRK yang telah disusun seluas 24.814,41 ha, diantaranya seluas 8.081,83 ha telah memiliki ketetapan hukum berupa Peraturan Daerah, dan seluas 4.377,30 ha telah diterbitkan Keputusan Walikota. Sedangkan sisanya seluas 12.355,28 ha masih dalam proses pengesahan melalui Perda maupun melalui Keputusan Walikota.

Surabaya sebelumnya telah memiliki Master Plan Surabaya 2000 yang berlaku sampai dengan Tahun 2000, yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah No 23 Tahun 1078. Dengan berlakunya Undang-undang NO 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang maka setiap Kota/Kabupaten harus menyusun Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota/Kabupaten dan disahkan dengan sebuah Peraturan Daerah. Pada tahun 2001 telah dimulai evaluasi dan pada Tahun 2003 Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan Penyusunan RTRW yang dilengkapi dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) RTRW termasuk kajian teknis serta akademis, sedangkan pada Tahun 2004 telah dilakukan pembahasan-

pembahasan serta sosialisasi RAPERDA dan diharapkan pada Tahun 2005 dapat disahkan sebagai PERDA.

2. Perumahan Dan Permukiman

Program pembangunan di bidang permukiman yang telah dilaksanakan selama periode masa jabatan (tahun 2002 sampai dengan tahun 2004) ditujukan bagi masyarakat miskin di perkotaan khususnya yang terkait dengan ketidakterjangkaun masyarakat guna memperoleh perumahan yang layak serta kemampuan meningkatkan sarana prasarana lingkungan permukimannya. sedangkan sasaran programnya adalah terciptanya standart equipment, sanitasi maupun utilitas umum.

Pembangunan dibidang permukiman tidak berarti hanya membangun perumahan / permukiman baru, akan tetapi juga bagaimana kualitas sarana prasarana permukiman itu menjadi lebih baik, lebih sehat dan tidak kumuh. Pemerintah Kota sangat menaruh perhatian pada lingkungan permukiman ini, khususnya kawasan kumuh karena pada umumnya sarana prasarana khususnya sanitasi kurang memadai sehingga berakibat serta berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Perbaikan sarana prasarana di lingkungan permukiman kumuh dilaksanakan melalui kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan (PLP) dan Perbaikan Kampung Terpadu (KIP Komprehensif) yang telah dimulai sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini.

a. Perbaikan Lingkungan Perkampungan (PLP)

Kegiatan ini melibatkan partisipasi masyarakat, dimana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 2002 anggaran berasal dari APBD sebesar Rp 1.937.500.000 sedangkan dana partisipasi masyarakat sebesar Rp. 1.072.568.390 atau 55 % dari dana bantuan APBD, yang meliputi 107 Kelurahan dengan perbaikan jalan dan jembatan 14.278 m, saluran 9.927 m. Pada Tahun 2003 dana APBD sebesar Rp 3.315.000.000 sedangkan dana partisipasi

masyarakat sebesar Rp 2.132.256.800 atau 64,32 % dari dana bantuan APBD yang meliputi 126 Kelurahan dengan perbaikan jalan 21.102 m, saluran 6.861 m. Sedangkan pada tahun 2004 sampai dengan bulan September dana APBD sebesar Rp 7.127.826.517,25, sedangkan dana partisipasi masyarakat sementara sebesar Rp 5.008.394.200 atau 41,56 % dari dana bantuan APBD. Partisipasi ini akan terus bertambah karena proyek belum selesai. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi perbaikan jalan 51.056 m dan saluran 20.264 m

b. KIP Komprehensif

Program KIP Komprehensif ini merupakan pengembangan dari program perbaikan kampung secara terpadu dimana selain pembangunan fisik lingkungan juga pembangunan sosial ekonomi masyarakatnya. KIP Komprehensif dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat. dimana penyusunan rencana kegiatan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya ditentukan berdasarkan aspirasi dan dimusyawarahkan oleh warga masyarakat kampung sendiri. Sasaran implementasi program ini adalah warga kampung dengan tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah.

KIP Komprehensif mulai dilakukan sejak tahun 1998, dan sampai dengan tahun 2001 telah dilaksanakan di 19 Kampung/Kelurahan, dan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 KIP Komprehensif telah dilaksanakan pada 26 Kampung/Kelurahan, sehingga sampai saat ini KIP Komprehensif telah dilaksanakan pada 45 Kampung/Kelurahan. Pelaksanaan KIP Komprehensif ini akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga dapat mengatasi permasalahan keberadaan permukiman kumuh di Surabaya.

2.4.2. Program Transportasi

Permasalahan transportasi di kota Surabaya saat ini meliputi : Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, Kualitas pelayanan

angkutan umum (bus kota) kurang memadai dan masih didominasi angkutan berkapasitas kecil (mikrolet), masih dominannya penggunaan kendaraan pribadi dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi, penyelenggaraan parkir on street menjadi salah satu sumber PAD akan tetapi tidak sebanding dengan dampak kemacetan yang ditimbulkannya, belum terlayannya angkutan umum pada pengembangan kawasan, masih adanya persimpangan yang berhimpitan dengan perlintasan sebidang, masih lemahnya penegakan hukum dan masih rendahnya mutu pelayanan dibidang perijinan. Kondisi dan permasalahan transportasi kota Surabaya dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.4.2.1. Perhubungan Darat

a. Kondisi Sarana dan Prasarana

1). Jalan Raya

Jaringan jalan di kota Surabaya sampai dengan tahun 2004 memiliki panjang jalan dan jalan tol \pm 1082.44 Km belum termasuk jalan lokal yang belum diserahkan pihak pengembang (investor), sedangkan untuk panjang jalan kota Surabaya sendiri \pm 983 km. Sistem jaringan jalan Kawasan Metropolitan Surabaya yang ada saat ini didominasi pergerakan lalu lintas arah Utara – Selatan, dari arah Sidoarjo ke pusat kota dan arah barat – timur dari Gresik ke pusat kota. Demikian juga dengan pergerakan langsung yang dilayani Jalan Tol Gempol – Surabaya. Sedangkan untuk pergerakan arah Timur – Barat dilayani oleh Jalan Tol Manyar – Gresik – Surabaya.

Secara umum sistem jaringan jalan Kota Surabaya sudah tidak mampu lagi melayani pergerakan lalu lintas secara optimal. Hal ini terlihat dari tingkat pelayanan jaringan jalan berdasarkan angka rasio volume lalu lintas terhadap kapasitas ruas jalan (rasio v/c) sebagian besar lebih dari 0,8 bahkan lebih dari 30%-

nya dalam keadaan sangat padat dengan rasio v/c lebih dari 1,0.

Seperti kota-kota metropolitan lainnya, Kota Surabaya menghadapi permasalahan transportasi yang sangat kompleks dikarenakan tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi yang tidak diikuti dengan pertumbuhan kapasitas dan jaringan jalan yang memadai. Hal ini dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.17. untuk data panjang jalan dan Tabel 2.18. untuk data jumlah kendaraan.

Tabel 2.17.
Data Jalan Raya
Di Kota Surabaya Tahun 2002 – 2004

| No. | Status Jalan | 2002 | 2003 | 2004 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Pjg(km) | Pjg(km) | Pjg(km) |
| 1. | Jalan Nasional | 80.87 | 80.87 | 80.87 |
| 2. | Jalan Propinsi | 18.57 | 18.57 | 18.57 |
| 3. | Jalan Kota | 983 | 983 | 983 |
| 2. Jumlah | | 1082.44 | 1082.44 | 1082.44 |

Tabel 2.18.
Data Jumlah Kendaraan
Di Kota Surabaya Tahun 2002 – 2004

| No. | Jenis Kendaraan | 2002 (unit) | 2003 (unit) | 2004 (unit) |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | Sepeda Motor | 630.933 | 708.343 | 800.008 |
| 2. | Mobil Penumpang | 182.078 | 189.472 | 204.313 |
| 3. | Mobil Barang | 69.245 | 72.726 | 79.725 |
| 4. | Mobil Bus | | | |
| | • <i>Umum</i> | | | |
| | Bus Besar | 1.032 | 1.048 | 1.060 |
| | Bus sedang | - | - | - |
| | Bus Kecil | - | - | - |
| | • <i>Bukan Umum</i> | 708 | 707 | 771 |
| 5. | Kendaraan Khusus | 160 | 166 | 92 |
| 6. | Mobil Penumpang Umum | 8.444 | 11.093 | 11.931 |
| 7. | Kendaraan Roda tiga | - | - | - |
| 3. Jumlah | | 892.600 | 983.555 | 1.097.900 |

Untuk kendaraan Angkutan Umum dan angkutan barang yang wajib uji tahun 2000 – 2004 dan perkiraan sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.19.
Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji Di Kota Surabaya

| Th | Mobil Penumpang | Mobil Bus | Mobil Barang | Kendaraan Khusus | Kereta Gandengan | Kereta Tempelan | Jumlah |
|-------|-----------------|-----------|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| 2.000 | 4.226 | 6.421 | 54.458 | 356 | 1.700 | 1.716 | 68.877 |
| 2.001 | 4.239 | 6.434 | 58.557 | 359 | 1.666 | 1.963 | 73.218 |
| 2.002 | 4.497 | 6.611 | 62.130 | 381 | 1.667 | 2.254 | 77.540 |
| 2.003 | 4.756 | 6.487 | 65.049 | 414 | 1.719 | 2.604 | 81.029 |
| 2.004 | 5.717 | 6.680 | 71.637 | 438 | 1.873 | 3.030 | 89.375 |

Kebutuhan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (APILL) dapat di lihat pada Tabel 2.20. sebagai berikut :

Tabel 2.20.
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

| No. | Jenis Lokasi | Eksisting 2004 (buah) |
|--------|---|-----------------------|
| 1. | Persimpangan | 92 |
| 2. | CCTV | 24 |
| 3. | Penyeberangan jalan | 22 |
| 4. | Ruas jalan (Lampu Kuning / Warning Light) | 5 |
| Jumlah | | |

Sedangkan fasilitas prasarana lalu lintas untuk rambu lalu lintas dan marka jalan ditunjukkan dengan Tabel -2.21. dan Tabel 2.22.

Tabel 2.21.
Rambu Lalu Lintas Di Kota Surabaya

| No. | Jenis | Eksisting 2005 (buah) | Kebutuhan | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Rambu Lalu Lintas | 5.607 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2. | RPPJ | 116 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 3. | Papan Nama | 1.722 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. Jumlah | | 7.445 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148 |

Tabel 2.22.
Data Kondisi Dan Panjang Marka Di Kota Surabaya

| No. | Jenis | Eksisting 2005 (m ²) | Kebutuhan | | | | | Total (m ²) |
|------------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 1. | Thermo Plastic | 25.283 | 23.518 | 23.518 | 23.518 | 23.518 | 23.518 | 117.590 |
| 2. | Cold Plastic | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 |
| 5. Jumlah | | 25.283 | 25.518 | 25.518 | 25.518 | 25.518 | 25.518 | 127.590 |

Ruang parkir merupakan salah satu prasarana yang sangat membantu dalam kelancaran lalu lintas, prasarana pendukung ini dapat dilakukan di jalan yang membutuhkan tempat untuk berhenti, terutama jalan-jalan yang melalui pusat-pusat perdagangan, perkantoran dan tempat aktivitas lainnya.

Potensi parkir Tepi Jalan Umum di wilayah Kota Surabaya adalah 1.454 lokasi dengan jumlah jukir 1.454 dan jumlah potensi Tempat Khusus parkir ada 43 lokasi.

Sistem jaringan angkutan umum penumpang meliputi rute trayek dan simpul transportasi meliputi terminal dan sub terminal/pangkalan. Secara umum jaringan angkutan umum sudah melayani seluruh wilayah Kota Surabaya dengan penyebaran relatif merata. Meskipun demikian sebagian besar angkutan umum tersebut adalah berkapasitas kecil (s/d 12 orang). Demikian juga bila ditinjau dari segi pelayanannya masih jauh dari memadai sebagai angkutan umum perkotaan.

Angkutan kota di Kota Surabaya terdiri dari 95 (sembilan puluh lima) trayek, terdiri dari 58 (lima puluh delapan) angkutan kota dan 27 (dua puluh tujuh) trayek bus kota.

Prasarana pendukung angkutan umum meliputi terminal dan tempat henti/shelter di Kota Surabaya, untuk terminal terdiri dari 3 (tiga) terminal, yaitu :

a). Terminal type A,

- Terminal Purabaya terletak di Desa Bungurasih Kabupaten Sidoarjo, berfungsi untuk angkutan Antar

Kota antar Propinsi (AKAP) dan antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), serta Bus Kota;

- Terminal Tambak Osowilangon terletak di Kecamatan Benowo yang juga berfungsi untuk angkutan Antar Kota antar Propinsi (AKAP) dan antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), serta Bus Kota;

b). Terminal type B, yaitu Terminal Joyoboyo yang terletak di Jalan Joyoboyo Kecamatan Wonokromo merupakan terminal yang melayani Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota, serta Bus Kota.

Sedangkan data kondisi tempat perhentian angkutan umum dapat dilihat pada tabel 2.23.

Tabel 2.23.
Data Ketersediaan Tempat Perhentian Angkutan Umum

| No. | Fungsi Jalan | Dengan bangunan: shelter/ halte bus (buah) | | Tanpa bangunan/ hanya rambu (buah) | |
|------------------|-----------------|--|-----------|------------------------------------|-----------|
| | | Dibutuhkan | Tersedia | Dibutuhkan | Tersedia |
| 1. | Jalan Nasional | 29 | 23 | 12 | 12 |
| 2. | Jalan Propinsi | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 3. | Jalan Kabupaten | - | - | - | - |
| 4. | Jalan Kota | 20 | 16 | 6 | 5 |
| 6. Jumlah | | 58 | 47 | 24 | 22 |

2). Jalan Rel

Orientasi pengembangan sistem transportasi kereta api lebih diarahkan pada pendayagunaan sarana dan prasarana yang sudah ada ditambah pengadaan prasarana dan sarana baru yang teknologinya lebih baik.

Pergerakan penumpang KA yang paling besar adalah pada jalur Surabaya – Malang dan dari Surabaya ke luar Propinsi Jawa Timur. Demikian pula halnya dengan angkutan kereta api jalur Surabaya-Banyuwangi juga dilewati oleh angkutan barang dan penumpang yang volumenya cukup besar.

Untuk tipe perjalanan ulang alik dari arah selatan – utara (Surabaya-Sidoarjo) selain dilayani oleh angkutan jalan raya juga didukung oleh kereta api komuter dengan waktu perjalanan yang cukup singkat yaitu \pm 30 menit dan headway antara 30 s/d 60 menit.

Dengan kondisi yang ada saat ini serta melihat potensi yang ada, peranan angkutan kereta api di masa mendatang diharapkan dapat berkembang menjadi sarana transportasi yang lebih andal. Sistem pengangkutan yang ada di Jawa Timur khususnya Kota Surabaya terbagi ke dalam transportasi kereta api dan transportasi jalan raya. Pengangkutan kereta api mempunyai prospek efisiensi dan efektifitas yang dapat diandalkan.

Dalam pengembangan selanjutnya KA. Komuter akan dikembangkan untuk melayani perjalanan komuter masyarakat yang dari dan ke arah barat (Mojokerto) dan ke arah utara (Lamongan). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengintegrasikan jaringan transportasi, khususnya angkutan KA. Komuter.

2.4.2.2. Perhubungan Laut

Secara umum kondisi perhubungan laut di Kota Surabaya belum adanya kewenangan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pengelolaan, penataan serta perijinan bagi perusahaan penunjang angkutan laut dan perusahaan pelayaran yang ada di wilayah Kota Surabaya. Selain permasalahan tersebut adalah belum adanya sarana serta prasarana pelabuhan rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan sampai saat ini Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah melaksanakan registrasi bagi kapal dibawah GT. 7 Ton.

Adapun potensi angkutan laut, perusahaan pelayaran yang ada di Kota Surabaya akan sangat besar jika dikembangkan secara intensif dan telah ada regulasi yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.24.
Data Potensi Armada Kapal Dengan Ukuran Di Bawah Gt. 7 Tonase
Di Wilayah Kota Surabaya

| No. | Kecamatan | Armada | | | | Nelayan | | Keterangan |
|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | | Perahu Layar | Motor Tempel | Kapal motor | Jumlah | Pemilik | Pandega/Buruh | |
| 1. | Gunung Anyar | 15 | 15 | - | 30 | 12 | 24 | 30 Nelayan Andon |
| 2. | Rungkut | - | 22 | - | 22 | 20 | 10 | |
| 3. | Mulyorejo | - | 30 | - | 30 | 30 | 35 | |
| 4. | Sukolilo | - | 63 | - | 63 | 63 | - | |
| 5. | Bulak | - | 512 | - | 512 | 512 | 14 | |
| 6. | Kenjeran | - | 160 | - | 160 | 160 | 28 | |
| 7. | Krembangan | - | 106 | - | 106 | 106 | 16 | |
| 8. | Asem Rowo | - | 156 | - | 156 | 156 | 280 | |
| 9. | Benowo | 37 | 20 | - | 57 | 22 | - | |
| T | Jumlah | 52 | 1.084 | - | 1.136 | 1,081 | 407 | |

Tabel 2.25.
Data Potensi Perusahaan Penunjang Angkutan Laut
Dan Perusahaan Pelayaran Di Wilayah Kota Surabaya

| No. | Jenis Perusahaan | Jml | Status | |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | Cabang | Pusat |
| 1. | EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) | 104 | 0 | 104 |
| 2. | JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) | 300 | 140 | 160 |
| 3. | PBM (Pengusaha Bongkar Muat) | 145 | 10 | 135 |
| 4. | Pelayaran Nasional | 271 | 124 | 147 |
| 5. | Pelayaran Rakyat | 121 | 36 | 85 |
| Jumlah | | 941 | 310 | 631 |

2.4.2.3. Perhubungan Udara

Di bidang perhubungan udara permasalahan yang ada yaitu tidak adanya Bandar Udara yang diwilayah Kota Surabaya serta belum diberikannya kewenangan bagi Dinas Perhubungan untuk melakukan pembinaan serta pemberian ijin bagi angkutan kargo udara yang ada di wilayah Kota Surabaya. Selain hal tersebut diatas belum adanya koordinasi yang jelas antar instansi dan daerah tentang pengendalian dan pengawasan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan.

2.4.3. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Kota

Berbagai fakta menunjukkan bahwa kualitas lingkungan dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan permasalahan lingkungan hidup semakin kompleks. Permasalahan lingkungan yang di hadapi warga Kota Surabaya saat ini adalah adanya pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, hilangnya daerah resapan air, ancaman bencana banjir, dan lingkungan perumahan yang rawan kebakaran.

Permasalahan utama berkaitan dengan lingkungan hidup yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya adalah:

1. Kualitas udara, air dan tanah.
 - a. Pengendalian dan Pelestarian Kualitas Air

Kualitas air sangat dipengaruhi oleh tingkat pencemar yang masuk ke badan-badan air. Pencemaran merupakan efek dari pengelolaan sumber daya air yang tidak terkendali dengan tidak memikirkan rehabilitasi sumber daya air. Pencemaran juga disebabkan pembuangan limbah domestik dan limbah industri tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu.

Sampai saat ini, upaya pengelolaan air limbah perkotaan khususnya limbah cair domestik masih merupakan sebuah dilema. Penerapan sistem sanitasi individual seperti tangki septik dan cubluk yang dibangun di perkotaan kurang memadai dan tidak signifikan dalam mengurangi pencemaran badan air dan

pencemaran tanah. Penerapan sistem sanitasi terpusat masih belum tersedia.

Kualitas air permukaan juga menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Air permukaan sering mengalami *eutrofikasi/alga bloom* dan buih yang disebabkan karena adanya unsur nitrogen (N), Phospat (P) dan deterjen yang langsung dibuang ke badan air. Buruknya kualitas air permukaan karena sistim sanitasi yang tidak memadai merupakan salah satu faktor utama penyebab tingginya penyakit menular seperti diare (muntaber) dan demam berdarah. Bila sistim sanitasi tidak mengalami perbaikan secara signifikan, maka frekuensi dan tingkat penyebaran penyakit menular diare (muntaber) dan demam berdarah akan semakin tinggi ditahun-tahun yang akan datang.

Adapun perkembangan kualitas air di Kota Surabaya selama tahun 2002- September 2004 adalah sebagai berikut :

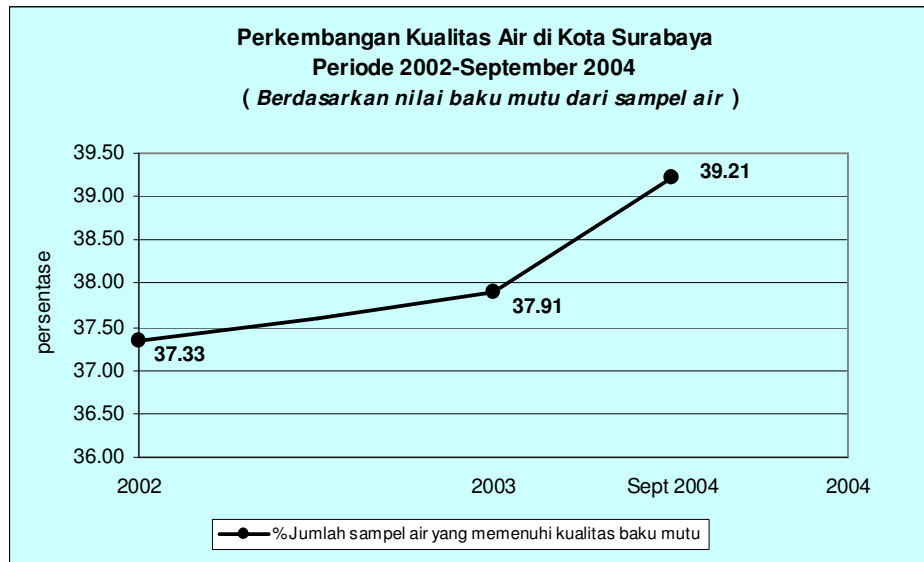
- Pada tahun 2002 yang memenuhi kualitas baku mutu adalah sebesar 37,33% dari sampel air, pada tahun 2003 naik sebesar 37,91%.
- Sedangkan pada tahun 2004 sampai dengan bulan Septemebr yang memenuhi kualitas baku mutu telah mencapai sebesar 39,21% dari sampel air yang diambil. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kualitas air di Kota Surabaya cenderung mengalami peningkatan.

Apabila dikaitkan dengan target yang ditetapkan dalam Renstrada sebesar 3% sampai dengan tahun 2005, maka sampai dengan tahun 2004 kualitas air yang memenuhi nilai baku mutu telah mengalami kenaikan sekitar 1,88% dibandingkan dengan kondisi kualitas air di tahun 2002. Belum tercapainya target tersebut disebabkan masih banyaknya industri dan atau kegiatan/usaha yang membuang limbahnya langsung ke saluran atau badan air tanpa proses pengolahan terlebih dahulu atau melalui proses

pengolahan tetapi effluen yang dihasilkan masih melebihi baku mutu yang ditetapkan.

Diperkirakan pada tahun 2005 target restrada sebesar 3 % dapat tercapai dengan upaya bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi yang berwenang menangani pengelolaan sungai-sungai lintas wilayah Kabupaten/Kota.

Grafik 2.19.



Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Diolah)

b. Pengendalian dan Pelestarian Kualitas Udara

Berdasarkan hasil monitoring kualitas udara ambien di Surabaya, beberapa senyawa pencemar terdapat dalam komposisi udara ambien Surabaya. Senyawa yang perlu mendapat perhatian serius sesuai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) adalah karbon monoksida (CO), Sulfur Oksida (SO_x), Partikulat (PM₁₀), Ozon, dan Nitrogen Oksida (NO_x). Senyawa kimia lain yang juga membahayakan adalah logam berat Timbal (Pb) yang terdapat dalam bahan bakar kendaraan bermotor. Senyawa Timbal (Pb) dari emisi gas buang yang terhirup manusia akan terakumulasi dalam darah dan dapat mengakibatkan penurunan tingkat kecerdasan anak. Tingkat pencemaran udara tersebut terutama

berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor). Penurunan kualitas atmosfer global yang disebabkan rusaknya lapisan ozon juga memperburuk kualitas udara dan menimbulkan efek Gas Rumah Kaca.

Hasil pemantauan kondisi kualitas udara di Kota Surabaya berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) selama periode 2002-September 2004, menunjukkan perkembangan sebagai berikut :

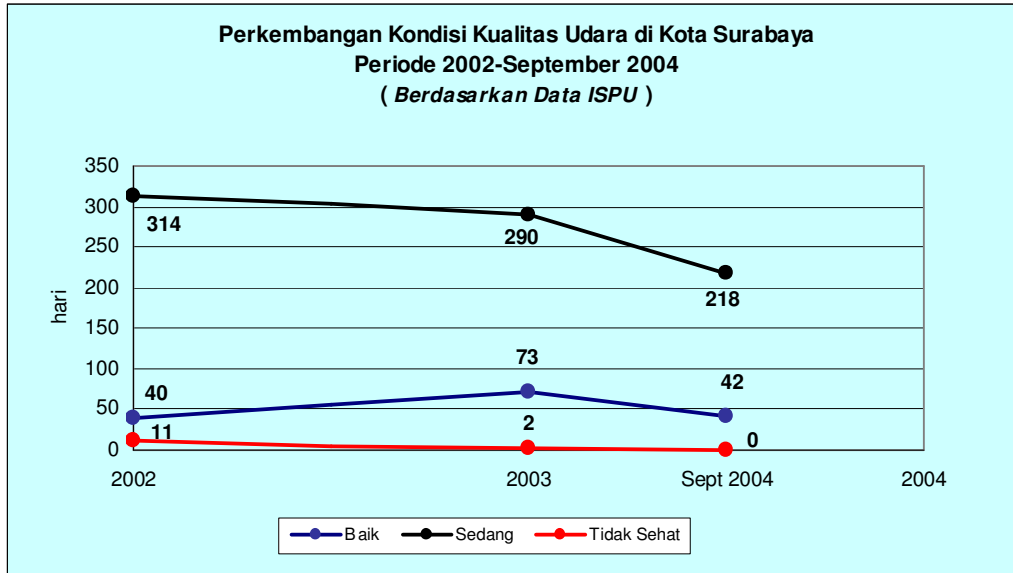
- Untuk kondisi kualitas udara baik, pada tahun 2002 selama bulan Januari-Desember berlangsung selama 40 hari, tahun 2003 meningkat menjadi 73 hari dan di tahun 2004, sampai dengan bulan September, kondisi kualitas udara baik telah berlangsung selama 42 hari.
- Untuk kondisi kualitas udara sedang, pada tahun 2002 berlangsung selama 314 hari, tahun 2003 turun menjadi 290 hari dan di tahun 2004 sampai dengan bulan September, kondisi kualitas udara sedang telah berlangsung selama 230 hari.
- Untuk kondisi kualitas udara tidak sehat, pada tahun 2002 berlangsung selama 11 hari, tahun 2002 turun menjadi 2 hari dan di tahun 2004 sampai dengan bulan September, belum pernah terjadi kondisi dengan kualitas udara tidak sehat.

Tabel 2.26.
Kualitas Udara Ambien di Kota Surabaya
(Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara)

| NILAI | ISPU | 2002 | 2003 | 2004 |
|-------------|--------------------|------|------|------|
| 1 - 50 | BAIK | 42 | 51 | 63 |
| 51 - 100 | SEDANG | 312 | 312 | 299 |
| 101 - 199 | TIDAK SEHAT | 11 | 2 | 4 |
| 200 - 299 | SANGAT TIDAK SEHAT | 0 | 0 | 0 |
| 300 - Lebih | BERBAHAYA | 0 | 0 | 0 |

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Diolah)

Grafik 2.20.

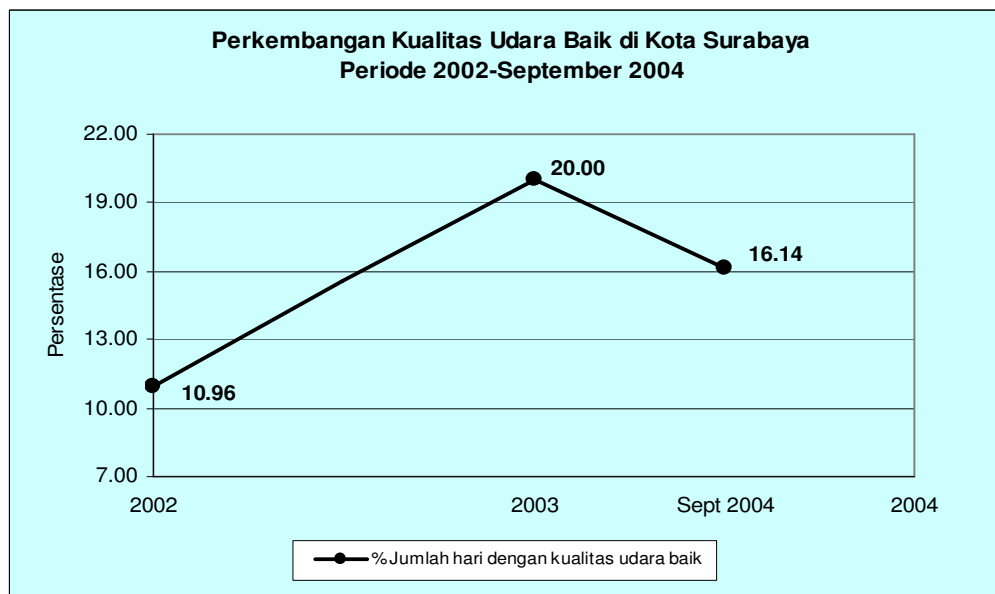


Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Diolah)

Perkembangan kondisi kualitas udara diatas menunjukkan bahwa persentase jumlah hari dengan kualitas udara baik, pada tahun 2002 mencapai sebesar 10,96% dari total jumlah hari selama 1 (satu) tahun, tahun 2003 naik menjadi 20% dan di tahun 2004 sampai dengan bulan September telah mencapai 16,15%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2003, kualitas udara di Kota Surabaya telah meningkat sekitar 9,04% dari kondisi tahun 2002 dan pada akhir tahun 2004 diperkirakan akan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstrada, yaitu sekitar 10%.

Berikut ini adalah grafik perkembangan kualitas udara baik, di Kota Surabaya selama periode 2002-September 2004 :

Grafik 2.21.



Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Diolah)

c. Pengendalian dan Pelestarian Kualitas Tanah

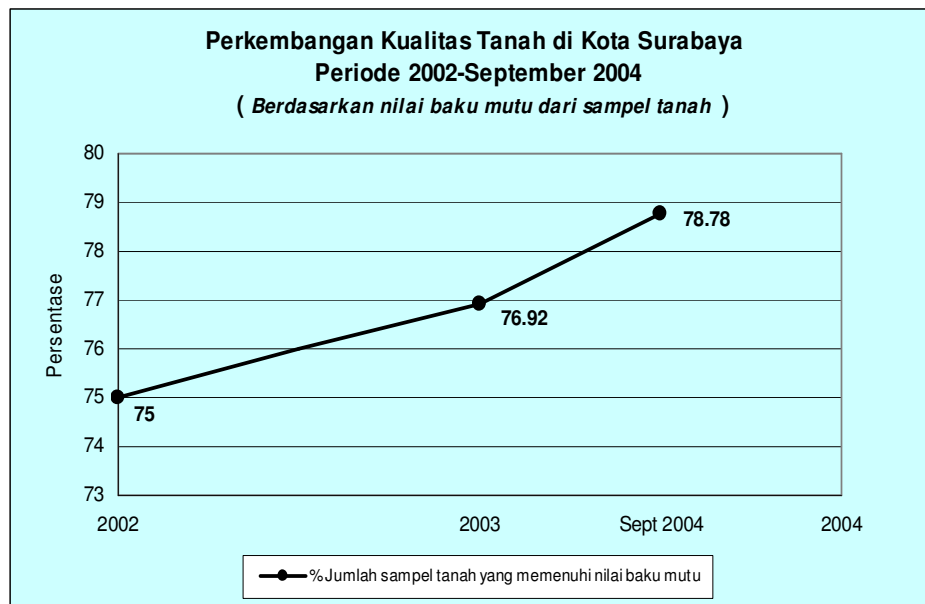
Pencemaran tanah lebih disebabkan oleh ulah dan aktivitas manusia, karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Saat ini kota Surabaya hanya mengandalkan “septic tank” untuk pengolahan limbah rumah tangga. Secara umum sistim septic tank hanya mampu mengolah limbah rumah tangga dengan efisiensi pengolahan sekitar 60 – 70%. Artinya hasil pengolahan septic tank belum aman untuk dialirkan ke lingkungan sekitarnya. Air yang keluar dari septic tank merembes memasuki tanah sekitarnya dan mencemarinya. Dengan kondisi ini dan dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa, maka jumlah air yang mencemari tanah setiap harinya cukup besar. Jumlah ini akan lebih besar lagi bila ditambah dengan limbah industri yang juga masih belum diolah dengan baik. Berdasarkan hasil sampel, kualitas tanah di kota Surabaya yang memenuhi baku mutu masih di bawah 80%.

Adapun perkembangan kualitas tanah di Kota Surabaya selama tahun 2002-September 2004 adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2002, yang memenuhi nilai baku mutu sebesar 75%, tahun 2003 naik menjadi 76,92%.
- Tahun 2004, sampai dengan bulan September jumlah sampel tanah yang telah memenuhi nilai baku mutu mencapai sebesar 78,78%. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kualitas tanah di Kota Surabaya cenderung mengalami peningkatan.

Apabila dikaitkan dengan target Renstrada sebesar 3% sampai dengan tahun 2005, maka sampai dengan September 2004 kualitas tanah yang memenuhi nilai baku mutu telah meningkat sebesar 3,78 % atau telah melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan hasil analisa sampling limbah padat industri) (*sludge*) banyak yang memenuhi baku mutu uji TCLP (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*).

Grafik 2.22.



Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Diolah)

2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian,

kawasan jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman secara alamiah maupun budidaya tanaman. Selama periode 2002 - 2004, Pemerintah Kota telah melakukan penghijauan kota dalam bentuk penanaman pohon. Pada tahun 2002 telah dilakukan penanaman pohon sebanyak 34.497 pohon yang terdiri dari 33.097 pohon produktif/pelindung dan 1.400 pohon semak/palem. Tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 43.766 pohon yang terdiri dari 29.270 pohon produktif/pelindung dan 14.496 pohon palem/semak, sedangkan pada tahun 2004 sampai dengan bulan September jumlah pohon yang ditanam telah mencapai sebanyak 33.311 pohon yang terdiri dari 28.718 pohon produktif/pelindung dan 4.593 pohon palem/semak. Dengan demikian selama tahun 2002 – September 2004, telah ditanam sebanyak 111.574 pohon di Kota Surabaya.

Sementara itu untuk RTH, Luas yang ideal adalah sebesar 20% 32.637,75 ha. Kondisi eksisting pada tahun 2002, lahan terbuka hijau yang tersedia adalah 225,58 ha. Pada tahun 2003 meningkat menjadi seluas 252,79 ha dan pada tahun 2004 sampai dengan bulan September telah menjadi seluas 260,43 ha. Perluasan lahan terbuka hijau tersebut diantaranya adalah median jalan dan taman.

Khusus untuk areal pemakaman di Kota Surabaya terdiri dari kawasan pemakaman umum dan Taman Makam Pahlawan. Pada tahun 2003 telah di bangun areal pemakaman umum di Keputih dengan luas 5 ha, areal tersebut diharapkan dapat menampung 11.182 makam. Secara keseluruhan luas kawasan makam yang dikelola Pemerintah Kota seluas 154 ha.

3. Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran

Data kebakaran di Kota Surabaya menunjukkan bahwa angka kejadian terbesar adalah pada bangunan perumahan daripada industri seperti dalam data di bawah ini. Penyebabnyapun beragam antara lain api terbuka meliputi korek api, kompor, lilin, obat nyamuk bakar dan minyak,

sedangkan listrik meliputi hubungan pendek, beban lebih maupun petir. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Tabel 2.27.
Kejadian Kebakaran dan Penyebabnya di Kota Surabaya

| No. | Tahun | Yang Terbakar | | | | | Penyebab | | | | | | Jumlah |
|-----|-------|---------------|----|----|----|-----|----------|----|----|----|----|-----|------------------|
| | | BP | BI | BU | KD | LN | AT | AM | PL | EN | PK | DP | |
| 1 | 2001 | 60 | 35 | 12 | 11 | 68 | 37 | 3 | 41 | 7 | 1 | 97 | 186 |
| 2 | 2002 | 107 | 59 | 25 | 11 | 177 | 93 | 10 | 68 | 9 | 0 | 199 | 379 |
| 3 | 2003 | 76 | 47 | 11 | 15 | 126 | 26 | 12 | 42 | 1 | 0 | 194 | 275 |
| 4 | 2004 | 91 | 53 | 0 | 5 | 104 | 57 | 4 | 38 | 11 | 0 | 143 | 253 |
| 5 | 2005 | 41 | 17 | 8 | 5 | 10 | 20 | 7 | 16 | 4 | 3 | 41 | 94 (sd. Agt '05) |

Sumber : Dinas PMK, 2005

Keterangan :

BP = Bangunan Perumahan : Perkampungan, Real Estate, RUSUN, Apartemen
 BI = Bangunan Industri : Pabrik, Perusahaan, Industri, Home Industri
 BU = Bangunan Umum : Hotel, Pasar, Pusat Perbelanjaan, Kantor, Stasiun
 KD = Kendaraan : Mobil, Sepeda Motor, Kapal, Pesawat Udara
 LN = Lain-lain : Yang tidak termasuk klasifikasi di atas
 AT = Api Terbuka : Korek Api, kompor, lilin, obat nyamuk bakar, minyak
 AM = Api Mekanik : Gesekan atau benturan antar benda
 PL = Listrik : Hubungan pendek, beban lebih, petir
 EN = Energi : Mengeluarkan panas atau persenyawaan bahan kimia
 PK = Panas kehidupan : Jamur minyak, jamur kompos
 DP = Dalam Penyelidikan : Belum diketahui penyebabnya

Sementara itu kejadian kebakaran selama tahun 2002 sampai 2005 menunjukkan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 2.28.
Perkembangan Kejadian Kebakaran di Kota Surabaya

| Tahun | Jumlah Kejadian | Tingkat Kerugian | Luas Areal Kebakaran | Korban | |
|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------|------|
| | | | | Mati | Luka |
| 2001 | 186 | Rp. 3.313.575.000,00 | 47.885 | 7 | 2 |
| 2002 | 379 | Rp. 49.470.045.000,00 | 745.727,5 | 5 | 5 |
| 2003 | 275 | Rp. 5.109.334.500,00 | 240.162,5 | 2 | 5 |
| 2004 | 253 | Rp. 3.372.000.000,00 | 625.055 | 5 | 3 |
| 2005 (sd. Agt 2005) | 94 | Rp. 5.334.730.000,00 | 19.366 | 0 | 0 |

Sumber : Dinas PMK, 2005

Faktor utama penghambat akselerasi kecepatan unit pemadam kebakaran tiba di lokasi bencana adalah kepadatan penduduk dan akses jalan di perkampungan kumuh/slum area yang sempit serta pemasangan portal/polisi tidur, jumlah kendaraan dan kemacetan lalu lintas. Faktor yang menyulitkan pemadaman adalah jauhnya hydran/saluran air/sungai di sekitar tempat kejadian kebakaran, masih adanya sebagian masyarakat yang bertindak emosional mengancam petugas PMK dengan

merebut pemancar air dan merusak slang kebakaran sehingga petugas sulit melaksanakan tugas sesuai dengan taktis, teknis dan strategi pemadaman serta kurangnya koordinasi dengan aparat terkait datang ke tempat kejadian menyebabkan petugas pemadam kurang bebas terganggu dalam pelaksanaan pemadaman.

Pencapaian target kebijakan akselerasi pemadam kebakaran untuk tiba di lokasi kejadian kebakaran dalam 15 menit hanya dapat dilakukan dengan cara menempatkan pos-pos pemadam kebakaran di wilayah Kota Surabaya dengan tetap memperhitungkan biaya investasi yaitu dengan tetap memperhatikan UPTD dan Pos Pembantu Pemadam Kebakaran yang sudah permanen dan membangun Pos Pemadam Kebakaran yang baru. Standar ideal pos pembantu dapat melayani radius 2,5 km² dengan kepadatan penghuni penduduk kurang lebih 250.000 jiwa. Sampai dengan tahun 2004 Pemerintah Kota telah melaksanakan pengadaan 2 pos pembantu, yang jika dibandingkan dengan standar memang masih belum memadai, hal ini disebabkan karena sulitnya mencari lokasi yang tepat juga biaya pembebasan yang mahal.

Rendahnya kesadaran pada sebagian masyarakat dalam membuat portal, menutup hydrant umum telah memberikan dampak tidak optimalnya fungsi mobil pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terkait dengan adanya beberapa perilaku masyarakat yang telah menyalahgunakan fasilitas umum – khususnya pada penutupan lokasi fasilitas hydrant – untuk kemudian telah dimanfaatkan sebagai tempat usaha PKL ataupun bangunan-bangunan liar, nampaknya juga harus mendapat perhatian yang cukup serius dari Pemerintah Kota, mengingat berdasarkan catatan dari Dinas PMK, terdapat 441 fasilitas hydrant dimana yang efektif yang dapat difungsikan hanya sekitar 145 hidrant.

Tabel 2.29.
Data Sumur Kebakaran

| No. | WILAYAH | SUMUR AKTIF | SUMUR TIDAK AKTIF |
|-----|------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Surabaya Pusat | 61 | 97 |
| 2 | Surabaya Selatan | 36 | 55 |
| 3 | Surabaya Utara | 22 | 93 |
| 4 | Surabaya Timur | 23 | 40 |
| 5 | Surabaya Barat | 0 | 14 |
| | J U M L A H | 145 | 299 |

Sumber : Dinas PMK, 2005

2.4.4. Program Pengelolaan dan Penanganan Kebersihan Kota

Pengelolaan kebersihan kota dilaksanakan baik oleh masyarakat melalui RT/RW dan Pemerintah Kota. Keterlibatan RT/RW adalah dalam pengumpulan sampah dari daerah permukiman untuk dibawa ke tempat penampungan sementara (TPS). Pemerintah Kota melaksanakan pengumpulan/penyapuan didaerah komersial, juga pengangkutan dari TPS ke tempat pembuangan akhir (TPA), termasuk pemusnahan di TPA.

Perkiraan jumlah timbulan sampah sesuai dengan sumbernya di Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

| | |
|---|-----------|
| Pemukiman, toko kecil, Pasar Krempyeng | : 68,14 % |
| Pasar | : 15,87 % |
| Penyapuan Jalan, Fasilitas Umum | : 5,10 % |
| Industri, daerah Pelabuhan | : 6,34 % |
| Rumah Sakit | : 0,31 % |
| Penghasil sampah > 2,5 m ³ /hari (Hotel, Kantor, dll) | : 4,24 % |

Dari segi kebersihan permukiman, sistem pengumpulan yang dilakukan oleh masyarakat RT/RW saat ini dapat menghindari terjadinya tumpukan sampah di permukiman. Akan tetapi dari segi teknis dan higienis, cara-cara yang dilakukan perlu ditingkatkan untuk menghindari terjadinya penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh kuman-kuman dalam sampah. Petugas pengumpul sampah di RT/RW mengangkut sampah dengan memindahkan sampah dari kotak sampah didepan rumah ke dalam gerobak, lalu kemudian memindahkan sampah dari gerobak ke kontainer

di TPS. Sewaktu petugas memindahkan secara berulang-ulang dengan menggunakan peralatan keranjang, sekop/pacul dan sapu, maka sampah yang sudah mulai membusuk dapat mencemari petugas bersangkutan dan juga menyebarkan kuman yang ada dalam sampah tersebar ke lingkungan sekeliling. Cara-cara pemindahan sampah yang demikian dapat membahayakan kesehatan sipetugas dan juga kesehatan lingkungan secara keseluruhan.

Pengelolaan TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan secara langsung maupun melalui kontrak kerja dengan pihak ketiga masih mempunyai beberapa kendala. Dengan meningkatnya kegiatan masyarakat, maka kebutuhan akan TPS juga meningkat. Sampai saat ini belum seluruh wilayah kelurahan mempunyai TPS yang cukup dekat dengan permukiman. Sehingga seringkali dijumpai TPS yang melebihi kapasitas, karena sudah terlalu banyak yang menggunakan. Permasalahan semakin rumit karena mencari lahan untuk TPS di kawasan permukiman tidak mudah. Kawasan padat di permukiman nyaris tidak mempunyai lahan yang memadai untuk dijadikan TPS. Karena itulah seringkali dijumpai TPS yang berada di tepi jalan.

Pada tahun 2002 jumlah TPS yang tersedia ada 225 lokasi yang terdiri dari 76 unit depo sampah, 90 unit Landasan sampah, sedangkan lokasi penempatan container sementara sebanyak 59 lokasi.

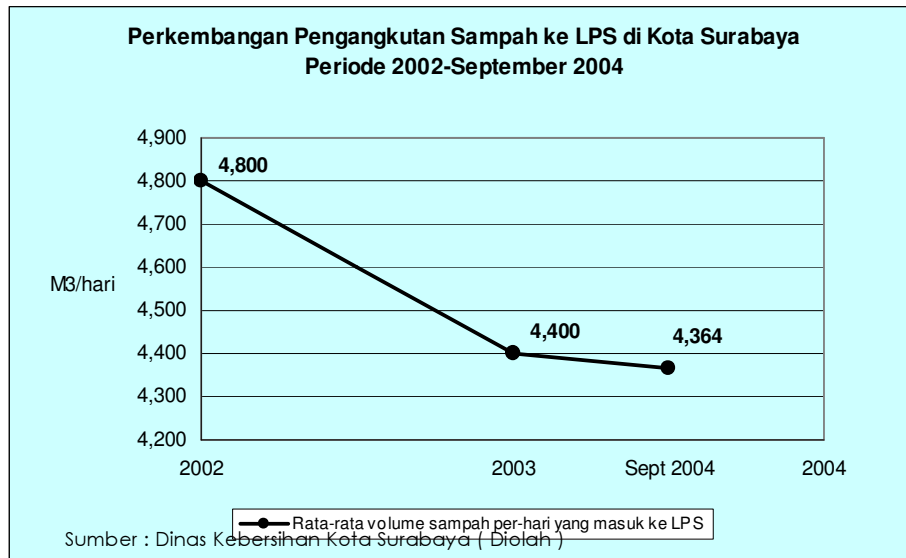
Pada tahun 2002 jumlah sampah yang masuk ke TPS rata-rata sebanyak 4.800 m³/hari, tahun 2003 berkurang menjadi rata-rata 4.400 m³/hari dan di tahun 2004 sampai dengan bulan September jumlah sampah yang masuk ke TPS rata-rata sebanyak 4.364 m³/hari.

Pengangkutan dari TPS ke TPA yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan seringkali kurang memadai karena jumlah armada truk yang belum sesuai kebutuhan. Selain itu dari jumlah yang belum memadai tersebut, banyak diantaranya memerlukan pemeliharaan dan perawatan yang besar. Kondisi truk yang sudah tua juga mengurangi kinerja pengangkutan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan. Karena itu

peremajaan truk angkutan secara berkala perlu dilakukan. Pengangkutan yang diserahkan kepada swasta dengan sistim kontrak “out sourcing” tidak selalu memberikan hasil yang efektif karena kebanyakan diantara truk angkut adalah yang sudah tua sehingga dari segi kemampuan angkut juga rendah. Selain itu truk swasta yang digunakan adalah truk biasa (bukan kontainer) sehingga seringkali menjadi masalah karena tidak dapat menahan lindi yang sudah mulai terjadi pada sampah. Sudah sering terjadi lindi berceceran sepanjang jalan dari truk pengangkut sampah.

Berikut ini adalah grafik perkembangan pengangkutan sampah ke TPS selama periode 2002-September 2004 :

Grafik 2.23.



Hal yang mengurangi kinerja angkutan sampah saat ini adalah jauhnya TPA yang hanya ada di Benowo. Jarak angkut yang cukup jauh membatasi jumlah ritasi tiap truk. Belum lagi kemacetan lalu lintas yang semakin hari semakin tinggi. Kemacetan lalu lintas kota sangat mengurangi kinerja pengangkutan sampah. Untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan karena kemacetan lalu lintas, perlu dilakukan kajian rute angkutan secara berkala sehingga diperoleh rute terpendek untuk masing-masing truk angkut.

Saat ini TPA yang dapat dioperasikan hanyalah TPA Benowo yang berjarak rata-rata 35 km dari pusat kota. TPA sesungguhnya dirancang dengan metoda "sanitary landfill", dimana seharusnya selain harus dilengkapi dengan lapisan kedap air didasarnya juga harus dilengkapi dengan sistim drainase untuk menangkap lindi yang kemudian harus diolah. Sanitary landfill seharusnya dilengkapi dengan sistim perpipaan untuk menangkap gas metana yang timbul dari hasil dekomposisi sampah. Selain itu dalam pengoperasian, maka seharusnya sampah ditutup dengan tanah (cover soil) setiap hari. Akan tetapi dalam kenyataannya lindi TPA Benowo sering mencemari kawasan sekitarnya, yang berarti lapisan TPA benowo tidak kedap air. Setiap tahun sering terjadi tuntutan yang diajukan oleh penduduk sekitar karena lindi TPA Benowo dianggap mencemari tambak disekitarnya. Kenyataan ini ditambah dengan belum berfungsinya IPAL lindi secara baik. Disisi lain, sampah juga tidak ditutup setiap hari dengan tanah, sehingga menimbulkan pencemaran ke lingkungan sekitar. Pengoperasian TPA Benowo seharusnya ditingkatkan menjadi benar-benar dengan metoda "sanitary landfill", sehingga dapat mengurangi pencemaran terhadap lingkungan.

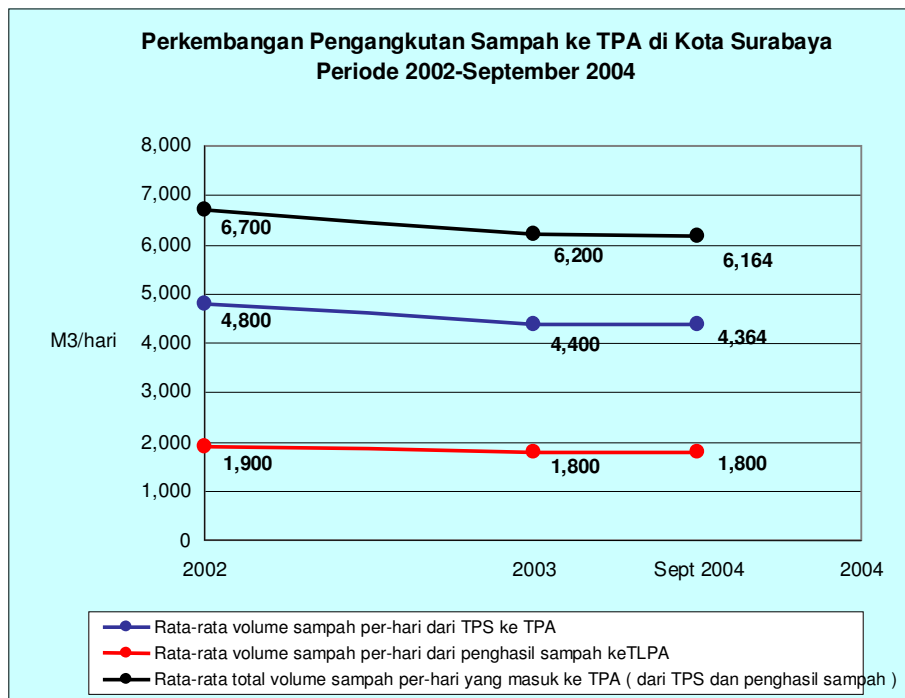
Hal lain yang saat ini harus diantisipasi adalah, dengan hanya memiliki TPA Benowo yang sudah hampir penuh, maka Pemerintah Kota Surabaya harus segera menyiapkan alternatif-alternatif pengolahan sampah. Perencanaan TPA yang baru harus segera mulai dilakukan, demikian pula alternatif pemanfaatan teknologi pemusnahan lainnya. Bila terlambat mengantisipasi kebutuhan pemusnahan/pengolahan akhir, maka kota Surabaya harus membayar sangat mahal, bila tidak dilakukan tindakan yang terarah dan terencana dengan baik.

Jumlah sampah yang masuk ke TPA Benowo pada tahun 2002 rata-rata sebanyak 6.700 m³/hari, tahun 2003 berkurang menjadi rata-rata 6.200 m³/hari dan pada tahun 2004 sampai dengan bulan September, rata-rata sebanyak 6.164 m³/hari. Jumlah tersebut terdiri dari sampah yang berasal dari TPS ataupun sampah yang dibuang langsung oleh penghasil

sampah (PD Pasar Surya, Industri, Pelabuhan dan lain-lain). Untuk mengurangi efek bau dan lalat yang ada di TPA, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyemprotan EM₄ secara rutin setiap sore hari. Sedangkan untuk mengolah air lindi yang dihasilkan sampah, Pemerintah Kota Surabaya telah membangun IPAL dengan kapasitas 100 m³/hari, dan kapasitas tersebut akan ditambah pada tahun 2004 ini, sehingga kapasitas yang terolah mencapai 200 m³/hari.

Berikut ini grafik perkembangan pengangkutan sampah ke TPA selama periode 2002-September 2004 :

Grafik 2.24.



Sumber : Dinas Kebersihan Kota Surabaya (Diolah)

2.4.5. Program Penanganan Banjir

Banjir di Kota Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi topografi Kota Surabaya yang relatif rendah dibandingkan dengan permukaan air laut, bahkan sebagian dataran merupakan cekungan. Dilain pihak terjadinya pergeseran peruntukan lahan yang semula merupakan kawasan resapan berubah menjadi kawasan

terbangun serta masih adanya saluran yang berfungsi irigasi belum dirubah menjadi saluran pematusan.

Tabel 2.30.
Perkembangan Luas Area Genangan Air Hujan

| Tahun | Luas Genangan | Genangan Berkurang | Sisa Luas Genangan |
|-------|---------------|--------------------|--------------------|
| 2001 | 4080,00 Ha | 80,00 Ha | 4000,00 Ha |
| 2002 | 4000,00 Ha | 134,79 Ha | 3865,21 Ha |
| 2003 | 3865,21 Ha | 318,51 Ha | 3546,70 Ha |
| 2004 | 3546,70 Ha | 177,25 Ha | 3369,45 Ha |

Saluran pematusan kota Surabaya dibagi dalam 5 (lima) wilayah, yaitu Sistim Genteng, Jambangan, Gubeng, Tandes dan Wiyung. Pada Sistim Jambangan dan Tandes, masih adanya saluran yang berfungsi irigasi masih belum dirubah menjadi saluran pematusan. Tabel berikut menggambarkan perkembangan kondisi saluran pematusan secara keseluruhan baik saluran primer, sekunder maupun tersier.

Tabel 2.31.
Perkembangan Saluran Drainase Yang Berfungsi Baik

| Tahun | Saluran Fungsi Baik | Prosentase Peningkatan Fungsi Saluran |
|-------|---------------------|---------------------------------------|
| 2001 | 157.929 M | |
| 2002 | 165.458 M | 4,55 % |
| 2003 | 193.034 M | 3,31 % |
| 2004 | 220.610 M | 2,25 % |

2.5. Pemerintahan Umum

2.5.1. Pelayanan Di Kecamatan Dan Kelurahan

Salah satu peningkatan pelayanan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat adalah pelayanan yang dilaksanakan malam hari. Pelayanan dimaksud dilaksanakan oleh Kelurahan dan Kecamatan, yang meliputi pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengurusan Kartu Keluarga (KK), Model C, SKKB, Surat Pindah, Surat Nikah, Surat Keterangan Kelahiran dan lain lain, dan sifatnya adalah masih merupakan uji coba dan pelayanan ini dilaksanakan antara jam 16.00 sampai dengan jam 20.00 WIB yang diujicobakan pada 10 Kecamatan.

Sampai dengan Juni 2005 yang melaksanakan pelayanan malam hari adalah 10 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mojo
2. Kecamatan Tandes, Kelurahan Manukan Kulon
3. Kecamatan Rungkut, Kelurahan Kalirungkut
4. Kecamatan Karang Pilang, Kelurahan Kebraon
5. Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Wonokromo
6. Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Gading
7. Kecamatan Bubutan, Kelurahan Gundih
8. Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo
9. Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawahan
10. Kecamatan Pabean Cantikan, Kelurahan Perak Utara

Data mengenai pengurusan malam hari selama Januari 2005 – Juni 2005 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32.
Uji Coba Pelayanan Malam Hari Di Kecamatan di Kota Surabaya
(Januari 2005 – Juni 2005)

| NO | KECAMATAN | KTP | KK | LAIN-2 |
|----|-----------------|------|-----|--------|
| 1 | Gubeng | 3616 | 0 | 0 |
| 2 | Tandes | 2661 | 305 | 53 |
| 3 | Rungkut | 3000 | 127 | 42 |
| 4 | Karangpilang | 2164 | 234 | 101 |
| 5 | Wonokromo | 2479 | 468 | 33 |
| 6 | Tambaksari | 2443 | 0 | 0 |
| 7 | Bubutan | 3601 | 395 | 174 |
| 8 | Semampir | 2725 | 431 | 70 |
| 9 | Sawahan | 2906 | 38 | 71 |
| 10 | Pabean Cantikan | 2429 | 86 | 67 |
| | Jumlah | | | |

Sumber Data : Laporan uji coba pelayanan malam hari dari Kecamatan, Januari 2005 – Juni 2005, diolah

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pengurusan KTP adalah paling banyak kemudian disusul oleh pengurusan KK dan selanjutnya adalah pengurusan lain – lain. Dengan demikian pelayanan malam hari sangat diperlukan oleh masyarakat dan akan memberikan penilaian yang positif bagi Pemerintah Kota Surabaya.

2.5.2. Pasar

salah satu kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan akan bahan pokok. Penyedia bahan pokok sangatlah beragam kelasnya, mulai dari pertokoan, distributor sampai dengan pasar tradisional.

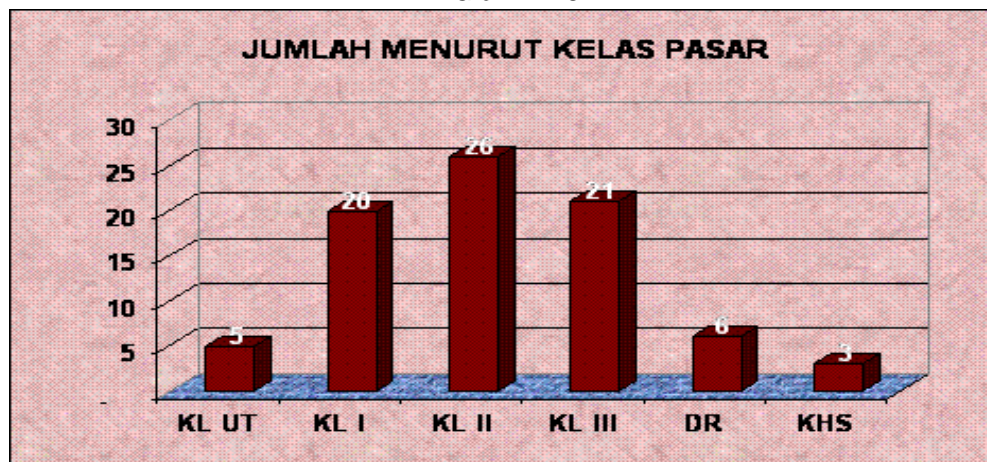
Penyedia kebutuhan bahan pokok dimaksud paling banyak adalah pasar yang sampai saat ini PD Pasar Surya mengelola 81 unit pasar dengan berbagai kelas. Rincian pasar yang dikelola adalah sebagai berikut :

Tabel 2.33.
Data Kelas Pasar

| NO | KELAS PASAR | JUMLAH UNIT |
|----|-------------|-------------|
| 1. | KELAS UTAMA | 5 UNIT |
| 2. | KELAS I | 20 UNIT |
| 3. | KELAS II | 26 UNIT |
| 4. | KELAS III | 21 UNIT |
| 5. | DARURAT | 6 UNIT |
| 6. | KHUSUS | 3 UNIT |
| | JUMLAH | 81 UNIT |

Sumber data : PD Pasar Surya, 2004

Grafik 2.25.



Sumber data : PD Pasar, 2004

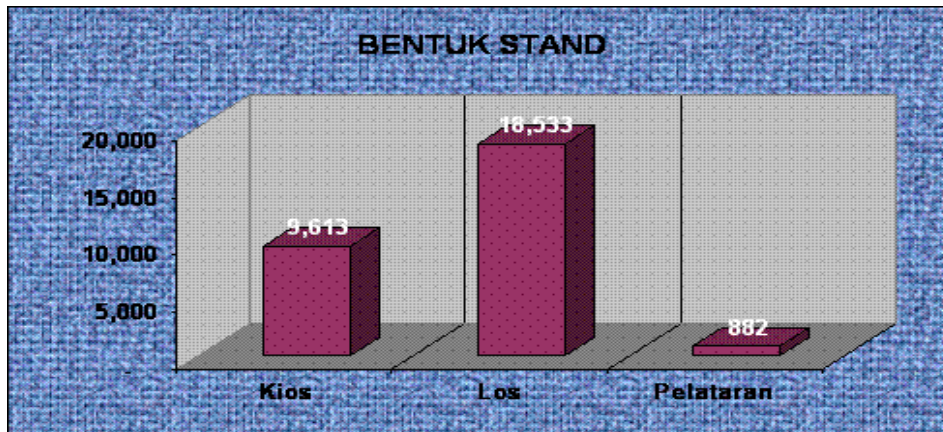
Jumlah Stand yang dikelola oleh PD Pasar Surya terdiri dari tiga macam tipe yaitu berbentuk kios, los dan pelataran. Jumlah masing-masing tipe adalah sebagai berikut :

Tabel 2.34.
Komposisi Jenis Stand
Yang Dikelola Pd Pasar Surya

| NO | BENTUK | JUMLAH STAND |
|-----------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Kios | 9.613 Stand |
| 2. | Los | 18.533 Stand |
| 3. | Pelataran Dalam Pasar | 882 Stand |
| | JUMLAH | 29.108 Stand |

Sumber data : PD Pasar Surya, 2004

Grafik 2.26.



Sumber data : PD Pasar Surya, 2004

2.5.3. Ketentraman dan ketertiban umum

2.5.3.1. Ketertiban

Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan penataan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah penertiban terhadap pelaksanaan Perda.

Pelaksanaan penertiban ini dilaksanakan secara terpadu antara Instansi Pemerintah, yaitu Dinas Polisi Pamong Praja dengan dinas - dinas terkait (Dinas Bangunan, Dinas Pendapatan, Bagian Perekonomian, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) serta Instansi vertikal lainnya, di antaranya dari unsur Kepolisian, Korem 084

Bhaskara Jaya, Garnisun, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Kecamatan serta Kelurahan setempat.

Kegiatan penertiban yang ditangani meliputi 10 obyek penertiban, yaitu Penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima, pemasangan reklame, Ijin Mendirikan Bangunan, penertiban HO, anak jalanan dan gepeng, Pekerja Seks Komersial, kebersihan, parkir dan hiburan malam, bilyard maupun panti pijat.

Dalam pelaksanaan penertiban telah direncanakan mengenai jumlah sasaran ataupun lokasi - lokasi yang akan menjadi target penertiban, dan ditetapkan target paling banyak adalah penertiban terhadap pedagang kaki lima yang setiap bulannya diperkirakan sejumlah 4.500 obyek, kemudian reklame insidentil yang berupa spanduk, baliho ataupun lainnya yang sifatnya sementara sebanyak 763 reklame, penertiban terhadap anjal dan gepeng yang berada di perempatan jalanan dengan target sebanyak 140 anjal / gepeng, penertiban terhadap yustisi sebanyak 80.

Penertiban yang belum sempat terjangkau adalah penertiban terhadap reklame yang menempel di pohon ataupun berupa stiker - stiker yang menempel di prasarana umum (tiang - tiang utilitas, tiang listrik ataupun tiang telepon).

Di samping pelanggaran sebagaimana obyek yang telah ditertibkan, juga terdapat beberapa pelanggaran potong pohon tanpa ijin telah terjadi 1 kali di bulan April, pejalan kaki / PKL sebanyak 11 pelanggaran pada bulan April, 13 pelanggaran pada bulan Mei, 21 pelanggaran pada bulan Juni.

2.5.3.2. Keamanan

Salah satu hak yang didapatkan oleh Warga Negara adalah perlindungan atau jaminan keamanan atau jaminan keselamatan. Kota Surabaya dengan jumlah penduduk yang tinggi dan pembangunan yang sangat pesat juga mempunyai permasalahan

dalam bidang keamanan. Berbagai upaya telah dilaksanakan demi terwujudnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Tabel 2.35.
Data Keamanan Di Kota Surabaya
April 2005 – Juni 2005

| NO | URAIAN | BULAN | | | TOTAL | TINDAK LANJUT | |
|----|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| | | APRIL | MEI | JUNI | | SUDAH | BELUM |
| 1 | Pencurian | 131 | 106 | 118 | 355 | 355 | 192 |
| 2 | Pencurian ranmor | 87 | 68 | 99 | 254 | 254 | 39 |
| 3 | Perampokan | 56 | 46 | 52 | 154 | 154 | 73 |
| 4 | Pembunuhan | 3 | | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | Penganiayaan | 44 | 59 | 24 | 127 | 127 | 108 |
| 6 | Penipuan | 101 | 117 | 113 | 331 | 331 | 201 |
| 7 | Pemerasan | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| 8 | Pelanggaran lalu lintas | 33,854 | 34,518 | 31,931 | 100,303 | 100,303 | 0 |
| 9 | Kebakaran | 9 | 11 | 4 | 24 | 24 | 22 |
| 10 | Sengketa tanah | 13 | 14 | 11 | 38 | 24 | 22 |
| 11 | Demonstrasi | 52 | 85 | 50 | 187 | 187 | |
| 12 | Gangguan lainnya | 24 | 14 | 12 | 50 | 50 | 44 |
| | TOTAL | 34,377 | 35,041 | 32,417 | 101,835 | 100,821 | 712 |

Sumber Data : Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Januari 2005 – Juni 2005, diolah

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan Juni 2005 pelanggaran yang paling tinggi adalah pelanggaran terhadap lalu lintas yang mencapai 98,50% dari total pelanggaran yang ada atau sejumlah 100.303 pelanggaran selama April 2005 - Juni 2005, kemudian kasus pencurian sejumlah 355 kasus dan kasus penipuan sejumlah 331 kasus.

2.5.4. Perusahaan Daerah Air Minum

Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air banyak dibutuhkan untuk keperluan sehari – hari seperti minum, memasak, mandi dan sebagainya. Kebutuhan air bagi warga kota tidak dapat dipisahkan dari PDAM. PDAM merupakan usaha jasa milik pemerintah kota yang bergerak dalam bidang penyediaan dan pendistribusian air bersih selama ini merupakan pemegang lisensi tunggal baik dalam bidang produksi maupun aspek operasionalnya.

Pelanggan PDAM Surabaya terdiri dari rumah tangga, niaga, industri, sosial dan pemerintah yang kesemuanya disuplai oleh Instalasi – Instalasi Penjernihan PDAM. Instalasi Penjernihan tersebut terdiri dari :

- Instalasi Penjernihan Kayoon
- Sumber Air
- Instalasi Penjernihan Ngagel I
- Instalasi Penjernihan Ngagel II
- Instalasi Penjernihan Ngagel III
- Instalasi Penjernihan Karang Pilang I
- Instalasi Penjernihan Karang Pilang II

Tabel 2.36.
Produksi Air (M3)
(Januari 2005 - Juni 2005)

| INSTALASI PENJERNIHAN | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JUMLAH |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| IP Kayoon | 278,029 | 242,909 | 282,488 | 282,565 | 281,698 | 261,360 | 1,629,049 |
| Sumber Air | 867,666 | 790,527 | 876,950 | 833,755 | 882,210 | 842,886 | 5,093,994 |
| IP Ngagel I | 4,048,752 | 3,595,287 | 3,949,257 | 4,023,439 | 4,307,024 | 4,188,225 | 24,111,984 |
| IP Ngagel II | 2,355,646 | 2,063,353 | 2,281,348 | 2,240,396 | 2,238,057 | 2,231,785 | 13,410,585 |
| IP Ngagel III | 3,880,181 | 3,567,254 | 3,836,693 | 3,717,983 | 3,821,175 | 3,734,678 | 22,557,964 |
| IP Kr. Pilang I | 3,063,316 | 2,754,611 | 3,063,759 | 2,957,359 | 3,060,101 | 2,962,726 | 17,861,872 |
| IP Kr. Pilang II | 6,527,661 | 5,908,133 | 6,575,996 | 6,327,684 | 6,541,212 | 6,329,187 | 38,209,873 |
| Jumlah | 21,021,251 | 18,922,074 | 20,866,491 | 20,383,181 | 2,113,477 | 20,550,847 | 122,875,321 |

Sumber Data : PDAM Kota Surabaya, Januari 2005 – Juni 2005, diolah

Jumlah produksi air di 7 Instalasi Penjernihan dari Januari 2005 – Juni 2005 telah mencapai 122,875,321 m³, di mana IP.Karang Pilang II memberikan kontribusi terbesar yaitu 31,10%, kemudian disusul IP.Ngagel I sebesar 19,62%, IP.Ngagel III sebesar 18,36%, IP.Karang Pilang I sebesar 14,54%, IP.Ngagel II sebesar 10,91%, Sumber Air sebesar 4,15% dan IP.Kayoon sebesar 1,33%.

Produksi air tersebut didistribusikan untuk konsumsi perumahan sebesar 71,22%, perdagangan sebesar 9,44%, sosial khusus sebesar 6,36%, sosial umum sebesar 4,48%, pemerintah sebesar 4,14%, industri sebesar 3,21%, pelabuhan sebesar 0,37%, penjualan air tangki sebesar 0,12% dan hilang sebesar 0,62%.

Tabel 2.37.
Jumlah Pelanggan Menurut Jenis Pelanggan (M3)
(Januari 2005 - Juni 2005)

| PELANGGAN | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Perumahan | 304,950 | 305,485 | 306,293 | 307,261 | 307,602 | 308,340 |
| Pemerintah | 1,059 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,064 | 1,128 |
| Perdagangan | 23,821 | 23,922 | 23,974 | 23,979 | 24,041 | 24,105 |
| Industri | 855 | 862 | 865 | 864 | 866 | 867 |
| Sosial Umum | 4,904 | 4,901 | 4,897 | 4,892 | 4,889 | 4,889 |
| Sosial Khusus | 1,141 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,152 | 1,157 |
| Pelabuhan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah | 336,734 | 337,381 | 338,240 | 339,207 | 339,618 | 340,490 |

Sumber Data : PDAM Kota Surabaya, Januari 2005 – Juni 2005, diolah

Sedangkan jumlah pelanggan menurut jenis pelanggan PDAM dari Januari 2005 – Juni 2005 di mana pelanggan perumahan masih mendominasi yaitu sebanyak 90,56%, disusul perdagangan sebanyak 7,08% dan sosial umum sebanyak 1,44%.